

**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP)  
DI KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN  
SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi  
Konsentrasi : Magister Administrasi Publik**



**Diajukan Oleh :**

**MOHAMAD LESTARI  
D4E002107**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI  
KONSENTRASI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

**2005**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG

NAMA PENULIS : MOHAMAD LESTARI  
NIM : D4E002107

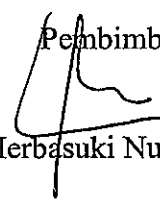
Tesis telah disetujui

Tanggal : .....

Pembimbing I,

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D.

Pembimbing II

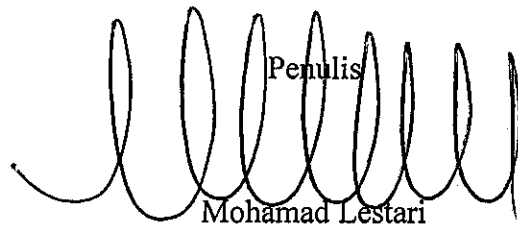
  
Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diteliti atau ditebitkan orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 27 Desember 2004

  
Penulis  
Mohamad Lestari

## RINGKASAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) adalah unggulan dengan sumber dana melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS) yang berupa pengembangan usaha yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut berupa kredit yang diberikan kepada masyarakat nelayan. Fokus penelitian ini adalah pada studi implementasi program PEMP dengan lokus di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Permasalahan yang muncul dalam implementasi program adalah kurang berhasilnya program dalam implementasinya di lapangan terlihat dari adanya tunggakan kredit dan penggunaan dana pinjaman untuk kegiatan komsumtif. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab dari kurang berhasilnya implementasi program karena kurang intensifnya dalam komunikasi program, kurang memadainya kemampuan pelaksana program, dan kurang mendukungnya sikap pelaksana program.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi program kurang berhasil, tingkat komunikasi kurang mendukung, kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik, dan sikap pelaksana program kurang mendukung. Kemudian hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian baik hipotesis minor maupun hipotesis mayoritas diterima. Hipotesis minor, terdapat pengaruh tingkat komunikasi terhadap implementasi program terlihat dari Z-test  $8,35 > Z\text{-tabel } 2,64$  (sig 1 %) dan  $1,99$  (sig 5 %) dan besarnya Koefisien Determinan (KD) sebesar 39,43 %. Terdapat pengaruh kemampuan kerja pelaksana program terhadap implementasi program terlihat dari Z-test  $7,99 > Z\text{-tabel } 2,64$  (sig 1 %) dan  $1,99$  (sig 5 %) dan besarnya Koefisien Determinan (KD) sebesar 36,12 %. Terdapat pengaruh sikap kerja pelaksana program terhadap implementasi program terlihat dari Z-test  $8,64 > Z\text{-tabel } 2,64$  (sig 1 %) dan  $1,99$  (sig 5 %) dan besarnya Koefisien Determinan (KD) sebesar 42,25 %. Hipotesis mayor, terdapat pengaruh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program terhadap implementasi program terlihat dari X-kuadrat  $192,626 > X\text{-tabel } 118,22$  (sig 1 %) dan  $107,52$  (sig 5 %) dan besarnya Koefisien Determinan (KD) sebesar 61,31 %. Hasil diskusi berdasarkan hasil pengujian hipotesis minor yang diajukan sikap kerja pelaksana program mempunyai hubungan dan pengaruh yang paling tinggi dalam implementasi program diikuti dengan tingkat komunikasi dan kemampuan kerja pelaksana program. Kemudian analisis kualitatif menunjukkan adanya kondisi yang mendukung analisis kuantitatifnya sebagai bentuk sumbangan yang memperkaya hasil penelitian ini. Oleh karena itu, maka prioritas perbaikan implementasi program diarahkan pada (1) perbaikan pada sikap kerja pelaksana program, (2) perbaikan pada tingkat komunikasi, dan (3) perbaikan pada kemampuan kerja pelaksana program.

Mengingat adanya kesesuaian antara teori dengan hasil penelitian maka implikasi yang muncul bilamana ketiga variabel independen (X) tersebut tidak diperbaiki sesuai dengan prioritasnya maka dimungkinkan adanya kondisi yang menunjukkan peluang terjadinya implementasi program yang lebih buruk lagi dan ini pada gilirannya akan berakibat pada semakin kurang berhasilnya implementasi

program. Oleh karena itu, perbaikan terhadap ketiga variabel independen (X) tersebut untuk segera dilakukan dalam rangka memperbaiki implementasi program di lapangan sehingga harapan terjadinya implementasi program yang lebih berhasil lebih berpeluang terwujud.

## **ABSTRAKSI**

### **STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (PEMP) DI KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

Nama : Mohamad Lestari  
NIM : D4E002107

**Kata Kunci** : Implementasi kebijakan, komunikasi, kemampuan kerja, sikap kerja

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di pengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program. Berdasarkan tujuannya, tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatory/ penjelasan dimana instrumen penelitiannya berupa kuesioner. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional random sampling, sedangkan analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk memperkaya analisis kuantitatifnya. Kemudian teknik pengujian hipotesisnya menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendal untuk mengetahui hubungan antar variabel dari hipotesis minor yang diajukan, Koefisien Korelasi Konkordansi Kendall untuk mengetahui hubungan antar variabel dari hipotesis mayor yang diajukan, dan Koefisien Determinan (KD) untuk mengetahui besarnya pengaruh antar variabel dari hipotesis minor dan mayor yang diajukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis minor dan mayor yang diajukan diterima. Hasil diskusi menunjukkan adanya kesesuaian antara teori yang menjadi landasan penelitian dengan hasil penelitian dilapangan. Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini yaitu mengharapkan pada peneliti lain untuk mengambil variabel X selain variabel X yang peneliti ambil dalam studi implementasi kebijakan, perbaikan sikap pelaksana program melalui saresahan/ rebug warga, komunikasi program secara intensif kepada penerima program, pelatihan manajemen program dan penambahan alokasi dana program.

## ABSTRACT

### THE STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF ECONOMIC EMPOWERING PROGRAMME OF COAST SOCIETY AT TANJUNG MAS VILLAGE NORTH SEMARANG DISTRICT SEMARANG

Nama : Mohammad Lestari  
NIM : D4E002107  
Kata Kunci : the implementation of policy, communication, the working ability and the working attitude.

The aim of the research is to analysis whether the implementation of economic empowering for the coast society is influenced by communication level, the work ability of the programme doer, and the attitude of working. Based on the aim, the research type used is proposional random sampling, meanwhile data analisys is done quantitatively and qualitative to enrich the quantitative analisys. Therefore, the technique of hipotesys test uses coefisien correlation of rank kendall to know the relation beetween variable from the minor hipotesys proposed, coefisien correlation kendall concordation to know the relation between variable from the major hipotesys proposed and determiant coefisien to know how big the effect between the variable from minor and major hipotesys proposed. The result of the research shows that major and minor hipotesys proposed is acceptable. The result of the discussion shows that there is the harmony between the theory and the practice. The suggestion that can be conveyed from the result of the research is hoping to other research to take X variable except variable X that the researcher took in the study of policy implementation, the improvement of the attitude of the official through saresehan , programme communication intensively toward the receiver of he programme, the practice management programme and the add of fund allocation programme.

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga atas karunia yang Dia berikan penulis dapat menyelesaikan pembuatan tesis dengan ini yang mengambil judul “Studi Implementasi program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan tanjung Mas kecamatan Semarang Utara kota semarang”.

Atas terselesaikannya pembuatan tesis ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan, serta motivasi yang telah diberikan sehingga tersusun tesis ini kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D selaku Pembimbing I dan Ketua Program Studi MAP Universitas Diponegoro.
2. Bapak Drs. Herbasuki Nurcahyanto, MT selaku Dosen Pembimbing II, Dra. Hj. Endang Larasati, MS dan Dra. Tri Yuniningsih, MSi selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran dan kritik yang sifatnya membangun bagi penulisan tesis ini.
3. Bapak dan Ibunda tercinta atas segala dorongan dan motivasinya.
4. Istriku dan anaku tercinta yang telah memberikan motivasinya demi terselesaikannya pembuatan tesis ini.
5. Teman-teman mahasiswa MAP Angkatan VIII Reguler Tahun 2003 di MAP Universitas Diponegoro.

Mengingat tiada kesempurnaan dalam sebuah karya maka Penulis menerima dengan sepenuh hati kritik dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang membutuhkannya.

Semarang, 27 Desember 2004

Penulis,

Mohamad Lestari

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>RINGKASAN</b> .....	v
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	9
B.1. Identifikasi Masalah .....	9
B.2. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Landasan Teori .....	12
B. Variabel-variabel Penelitian .....	19
B.1. Implementasi Program (Y).....	19
B.2. Tingkat Komunikasi ( $X_1$ ).....	23
B.3. Kemampuan Kerja Pelaksana Program( $X_2$ ).....	27
B.4. Sikap Kerja Pelaksana Program ( $X_3$ ).....	31
B.5. Pengaruh tingkat komunikasi ( $X_1$ ) terhadap implementasi program (Y).....	33
B.6. Pengaruh kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ) terhadap implementasi program (Y).....	34
B.7. Pengaruh sikap kerja pelaksana program ( $X_3$ ) terhadap implementasi program (Y).....	36
B.8. Pengaruh tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ) dan sikap kerja pelaksana rogram ( $X_3$ ) terhadap implementasi program (Y).....	37
C. Hipotesis .....	39
 <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	 <b>42</b>
A. Rancangan Penelitian.....	42
B. Ruang Lingkup.....	43
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Variabel Penelitian.....	43

E. Jenis dan Sumber Data .....	50
F. Instrumen Penelitian.....	51
G. Populasi, Cara Sampling, dan Teknik Pengambilan Sampel .	52
H. Teknik Pengumpulan Data .....	56
I. Teknik Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	61
A. 1. Keadaan Geografis.....	61
A. 2. Keadaan Demografi.....	61
A. 3. Keadaan Sosial, Ekonomi, dan Budaya.....	63
B. Penyajian Data.....	65
B. 1. Identitas Responden.....	66
B. 2. Implementasi Program (Y).....	69
B. 3. Tingkat Komunikasi ( $X_1$ ).....	80
B. 4. Kemampuan Kerja Pelaksana Program ( $X_2$ ).....	89
B. 5. Sikap Kerja Pelaksana Program ( $X_3$ ).....	97
C. Analisis Data .....	106
C. 1. Analisis Kuantitatif.....	106
C. 2. Analisis Kualitatif.....	111
D. Pengujian Hipotesis.....	113
E. Diskusi.....	122

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Rekomendasi.....	132

Daftar Pustaka

Matrik Kuesioner

Kuesioner

Lampiran-lampiran

## DAFTAR BAGAN

Bagan II. 1.	Skema siklus Kebijakan Publik .....	13
Bagan II. 2.	Bangun Teori Penelitian Pengaruh Tingkat Komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan Sikap Kerja Pelaksana Program (X3) terhadap Implementasi program (X4).....	18
Bagan II. 3.	Dampak Lansung dan Tidak Lansung pada Implementasi	37
Bagan IV. 1.	Teori Penelitian Pengaruh Tingkat Komunikasi (X1), Kemampuan Kerja Pelaksana Program (X2), Dan Sikap Kerja Pelaksana Program (X3) Terhadap Implementasi Program (X4).....	127

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.	Penerima Bantuan dan Besarnya Dana Bantuan Program PEMP Di Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003 .....	5
Tabel I. 2.	Besarnya Pinjaman dan Jenis Usaha serta Besarnya Angsuran Per Bulan Program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas tahun 2003 .....	5
Tabel I. 3.	Tunggakan Program PEMP di kelurahan Tanjung Mas sampai dengan Bulan April 2004 .....	6
Tabel I. 4.	Tingkat Pendidikan Pelaksana Program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003.....	8
Tabel III. 1.	Sampling Frame Penerima Dana Bantuan Program PEMP Tahun 2003 .....	53
Tabel III. 3.	Sampling Size Penerima Dana Bantuan Program PEMP Tahun 2003 .....	55
Tabel IV. 1.	Penduduk Kelurahan Tanjung Mas Menurut Kelompok Umur Tahun 2004.....	62
Tabel IV. 2.	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	63
Tabel IV. 3.	Sarana Pendidikan di Kelurahan Tanjung Mas.....	64
Tabel IV. 4.	Sarana Ekonomi di Kelurahan Tanjung Mas .....	64
Tabel IV. 5.	Responden Menurut Umur.....	66
Tabel IV. 6.	Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....	67
Tabel IV. 7.	Responden Menurut Jenis Kelamin .....	67
Tabel IV. 8.	Responden Menurut Kategori Program.....	68

Tabel IV. 9.	Tingkat Pengetahuan Penerima Program PEMP.....	69
Tabel IV. 10.	Sumber Informasi Penerima Program PEMP.....	69
Tabel IV. 11.	Besarnya Nilai Bantuan Program PEMP.....	70
Tabel IV. 12.	Besarnya Nilai Bantuan Program PEMP.....	70
Tabel IV. 13.	Tingkat Kelancaran Implementasi .....	71
Tabel IV. 14.	Tingkat Kemudahan Persyaratan Kredit .....	71
Tabel IV. 15.	Tingkat Keterlibatan dalam Program .....	72
Tabel IV. 16.	Tingkat Kemanfaatan Program.....	73
Tabel IV. 17.	Tingkat Kemampuan Badan Pelaksana Program.....	74
Tabel IV. 18.	Tingkat Pemenuhan Angsuran.....	74
Tabel IV. 19.	Tingkat Penambahan Modal .....	75
Tabel IV. 20.	Tingkat Kenaikan Pendapatan .....	76
Tabel IV. 21.	Mampu Mengatasi Persoalan Ekonomi .....	76
Tabel IV. 22.	Tingkat Kesadaran Penerima Program .....	77
Tabel IV. 23.	Klasifikasi Skor Variabel Implementasi Program .....	78
Tabel IV. 24.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Implementasi Program .....	79
Tabel IV. 25.	Tingkat Penguasaan Informasi Pelaksana Program PEMP .	80
Tabel IV. 26.	Tingkat Pemahaman Pelaksana Program.....	81
Tabel IV. 27.	Tingkat Kejelasan Informasi.....	82
Tabel IV. 28.	Tingkat Kemudahan Bahasa.....	82
Tabel IV. 29.	Tingkat Rincinya Informasi.....	83
Tabel IV. 30.	Tingkat Lengkapnya Informasi.....	84
Tabel IV. 31.	Tingkat Memadainya Informasi.....	84

Tabel IV. 32.	Tingkat Penggunaan Media Memperjelas Informasi.....	85
Tabel IV. 33.	Tingkat Sesuainya Informasi dengan Program.....	86
Tabel IV. 34.	Tingkat Kesesuaian Media.....	86
Tabel IV. 35.	Frekuensi Komunikasi dalam Implementasi.....	87
Tabel IV. 36.	Klasifikasi Skor Variabel Tingkat Komunikasi.....	88
Tabel IV. 37.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Tingkat Komunikasi.....	88
Tabel IV. 38.	Tingkat Kemampuan Mengerjakan Proses Persyaratan Kredit .....	89
Tabel IV. 39.	Tingkat Kemampuan Menerima Informasi.....	90
Tabel IV. 40.	Tingkat Kemampuan Menjalin Silaturahmi.....	90
Tabel IV. 41.	Tingkat Kemampuan menjalin Kerjasama.....	91
Tabel IV. 42.	Tingkat Kemampuan dalam Menyelesaikan Konflik .....	91
Tabel IV. 43.	Tingkat Kemampuan Menciptakan Kesadaran .....	92
Tabel IV. 44.	Tingkat Kemampuan Menerima Keluhan.....	92
Tabel IV. 45.	Tingkat Kemampuan Memberikan Ide-ide Pembaharuan ...	93
Tabel IV. 46.	Tingkat Kemampuan Merumuskan Solusi Permasalahan ...	94
Tabel IV. 47.	Tingkat Kemampuan Memberikan Pemahaman Prosedur Implementasi Program.....	94
Tabel IV. 48.	Tingkat Kemampuan Mengarsipkan Kertas Kerja.....	95
Tabel IV. 49.	Klasifikasi Skor variabel Kemampuan kerja Pelaksana Program .....	96
Tabel IV. 50.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Kemampuan Kerja Pelaksana Program.....	96

Tabel IV. 51.	Tingkat Kesesuaian Melaksnanakan Tugas Sesuai dengan Keinginan Pribadinya.....	97
Tabel IV. 52.	Tingkat Tanggapan Pelaksana Program.....	98
Tabel IV. 53.	Tingkat Kepercayaan Program PEMP Membawa Perubahan yang Positif .....	98
Tabel IV. 54.	Tingkat Tidak Bertentangan Program dengan Keyakinan-Keyakinan Pelaksana Program .....	99
Tabel IV. 55.	Tingkat Tidak Bertentangan dengan Norma-norma yang Dianut .....	100
Tabel IV. 56.	Tingkat Intensitas Menarik Angsuran.....	100
Tabel IV. 57.	Tingkat Melaksanakan Tugas Sesuai dengan Aturan.....	101
Tabel IV. 58.	Tingkat Menjalin Kerjasama dengan Penerima Program...	101
Tabel IV. 59.	Tingkat Pelaksana Menerima Program dengan Sepenuh Hatinya.....	102
Tabel IV. 60.	Tingkat Kenetralan Pelaksana Program.....	102
Tabel IV. 61.	Tingkat Mempengaruhi Para Penerima Program.....	103
Tabel IV. 62.	Klasifikasi Skor Variabel Sikap Kerja Pelaksana Program.	104
Tabel IV. 63.	Rekapitulasi Penilaian Variabel Sikap Kerja Pelaksana Program.....	104
Tabel IV. 64.	Tabulasi Silang antara Tingkat Komunikasi (X1) dengan Implementasi Prógram (Y).....	107
Tabel IV. 65.	Tabulasi Silang antara Kemampuan Kerja Pelaksana Program (X2) dengan Implementasi Program (Y).....	108

Tabel IV. 66.	Tabulasi Silang antara Sikap Kerja Pelaksana Program (X1) dengan Implementasi Program (Y).....	110
Tabel IV. 67.	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	125
Tabel V. 1.	Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian.....	131

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

**Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 89 – 90), bahwa:**

Kelahiran negara–negara baru melalui proses dekolonisasi setelah perang dunia II, menimbulkan tantangan baru bagi negara–negara tersebut, yaitu bagaimana mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita–citakan. Upaya untuk mewujudkan masyarakat dan negara yang dicita–citakan tidak saja di serahkan begitu saja pada proses evolusioner, spontan dan alami sebagaimana proses sejarah yang telah dilalui oleh negara–negara maju. Tuntutan historis ini mendorong negara–negara baru itu untuk dituntut untuk melakukan proses perubahan sosial yang terencana, *a planned societal change*, untuk mewujudkan model masyarakat tersebut. Proses perubahan sosial yang terencana tersebut disebut pembangunan.

Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara berkembangpun dalam usaha untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melakukan apa yang dinamakan pembangunan. Untuk memperoleh tujuan masyarakat yang dicita–citakan tersebut bangsa Indonesia menggunakan paradigma pembangunan yang nantinya dijadikan dasar pijakan dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Pada awal orde baru bangsa Indonesia dalam pembangunan menggunakan paradigma pertumbuhan ekonomi, dimana menurut Moeljarto Tjokrowinoto (1996: 94), bahwa:

Manifestasi dari orientasi pada pertumbuhan ekonomi ini nampak didalam berbagai kebijakan pembangunan yang diambil, yang pada hakikatnya bertujuan memperbesar *saving ratio* (reformasi perpajakan, reformasi perdagangan, peningkatan ekspor, khususnya ekspor produk manufaktur, devaluasi bantuan luar negeri dan sebagainya), serta memperkecil laju pertumbuhan penduduk.

Orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi tersebut walaupun telah mencapai taraf pertumbuhan ekonomi 7 % namun demikian prestasi yang telah terjadi tersebut hilang hanya dengan hitungan bulan sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi yang menjalar kearah krisis yang multidimensional dan hingga sekarang kita semua berusaha untuk kembali membangun bangsa yang terpuruk dalam kemelaratan, dimana dampak yang paling mencolok adalah kolapnya perekonomian rakyat kecil.

Untuk itulah berdasar pada yang telah terjadi tersebut sebuah pelajaran yang dapat dipetik bahwa paradigma pembangunan pertumbuhan ekonomi dianggap gagal dalam pembangunan nasional yang telah dilaksanakan. Maka pemikiran yang kemudian muncul adalah adanya paradigma pembangunan pemberdayaan masyarakat. Bentuk dari pemberdayaan masyarakat tersebut adalah pemberdayaan dalam mendorong perekonomian rakyat.

Beberapa program pemerintah yang diarahkan untuk mendorong perekonomian masyarakat telah banyak dilakukan melalui pengembangan keswadayaan masyarakat dalam bentuk perkreditan. Program perkreditan, seperti tersebut meliputi: Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha memfokuskan diri pada program pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir yaitu program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan

Semarang Utara, Kota Semarang. PEMP merupakan program unggulan dengan sumber dana melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS). Dana-dana yang diperoleh dari hasil pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dialihkan salah satunya untuk mensubsidi penduduk miskin. Hasil pengurangan tersebut mencapai 4,4 triliun rupiah dikembalikan kepada masyarakat melalui Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) yang berupa penyediaan beras murah sebesar 500 milyar rupiah, penyediaan air bersih 250 milyar rupiah, pelayanan kesehatan 950 milyar dan bantuan pendidikan 135 milyar serta bantuan penduduk miskin 1.395 milyar rupiah.

Tujuan dari PEMP adalah pengembangan usaha yang memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut dengan melalui perencanaan yang matang agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dengan program-program lain, tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Mengurangi beban kebutuhan masyarakat terutama akibat dari dampak kenaikan bahan bakar minyak.
2. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kelurahan Tanjung Mas / khususnya yang bergerak disektor perikanan dan wilayah pesisir serta masyarakat sekitar pada umumnya.
3. Meningkatkan peran aktif dari masyarakat agar mampu secara mandiri mengelola potensi yang ada secara berkelanjutan dengan dukungan dari permodalan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) melalui sumber dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan

Bakar Minyak (PKPS). Secara khusus dari tujuan usaha untuk masyarakat pemanfaat ikan, dagang ikan, pengelohannya adalah peningkatan hasil tangkapan ikan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang bergerak dalam usaha dagang ikan, pengolahan ikan skala usaha kecil.

Ruang lingkup usahanya meliputi, usaha penangkapan ikan dengan alat tangkapnya, usaha dagang ikan, dan pengolahan ikan yang umumnya masih termasuk dalam usaha kecil. Kemudian, pengelolaan usahanya dilakukan secara kelompok dengan nama Kelompok Nelayan, Kelompok Nelayan Jaring, Kelompok Dagang Ikan dan Kelompok Pengolah Ikan yang masing-masing kelompok dikoordinatori oleh Kelompok Masyarakat Pemanfaat ( KMP ) yang terdiri dari ketua dan sekretaris yang secara umum bertugas mengkoordinasikan kegiatan usaha dan pengembalian pinjaman modal usaha sehingga kegiatan usaha semua anggota KMP dapat berjalan dengan lancar. Bentuk pinjamanya adalah pinjaman lunak dimana jumlah dan pengembalianya sesuai dengan yang telah disepakati secara mufakat. Proses pengembalian modal usaha dalam bentuk cicilan, pengelolaannya diserahkan kepada ketua dan sekretaris KMP yang selanjutnya diserahkan kepada Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3) selaku pihak yang disertai manajemen program dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang selaku penanggungjawab operasional kegiatan.

Untuk memperjelas PEMP, berikut ini data tentang PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dapat dilihat dalam tabel I. 1, berikut:

Tabel I. 1  
PENERIMA BANTUAN DAN BESARNYA DANA BANTUAN  
PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Penerima Program	KMP	Anggota	Dana Ekonomi Produktif
1	Pengolah ikan	4	31	Rp. 36.425.000,00
2	Penangkapan/ Nelayan	57	498	Rp. 240.900.000,00
3.	Pedagang campuran	7	53	Rp. 36.425.000,00
	Jumlah	68	551	Rp. 323.900.000,00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

Besarnya pinjaman tiap anggota berdasarkan kategori penerima program berbeda-beda, berikut ini peneliti gambarkan mengenai besarnya pinjaman per anggota berdasarkan jenis usahanya dapat dilihat pada tabel I. 2 berikut:

Tabel I. 2  
BESARNYA PINJAMAN DAN JENIS USAHA  
SERTA BESARNYA ANGSURAN PER BULAN  
PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Jenis Usaha	Besarnya Pinjaman	Jasa Dan Jangka Waktu Pinjam	Besarnya Iuran/ Bulan
1	Nelayan	Rp. 500.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 49.200,00
2	Pengolah ikan	Rp. 1.175.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 99.182,00
3	Pemanggang ikan	Rp. 1.175.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 115.542,00
4	Pedagang Ikan Segar	Rp. 850.000, 00	1,5% dan 12 bln	Rp. 83.583,00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

Pengelolaan program PEMP dalam pelaksanaannya dilakukan dengan manajemen program dengan model pengelolaan dana Kelompok Masyarakat (KMP) dengan Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina

(LEP-M3) sebagai pengelola dana di tingkat kota yang dilakukan secara musyawarah yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut:

Hasil analisis kelayakan usaha pada program PEMP yaitu, untuk pemberian jaring serta perawatan perahu. Demikian juga bagi pengolah ikan dan pedagang campuran dihitung dengan jasa yang diberikan sebanyak 1,5 % per bulan dengan jangka waktu pengembalian 12 bulan.

Dalam pelaksanaan Program PEMP berdasarkan observasi peneliti dan wawancara dengan koordinator KMP dan LPPE-M3 bahwa program tersebut dalam implementasinya kurang berhasil secara maksimal. Kurang berhasilnya implementasi program tersebut dapat dilihat dari adanya fenomena sebagian penerima program yang menunggak angsurannya yang disebabkan oleh adanya persepsi dari masyarakat bahwa program tersebut bentuknya hibah sehingga jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan mereka menganggap bukan suatu masalah. Berikut ini data tunggakan program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas sampai dengan Bulan April Tahun 2004, dapat dilihat pada tabel I. 3 berikut:

Tabel I. 3  
TUNGGAKAN PROGRAM PEMP DI KELURAHAN TANJUNG MAS  
SAMPAI DENGAN APRIL 2004

No	Penerima Program	KMP	Anggota	Dana Ekonomi Produktif
1	Pengolah ikan	4	12	Rp. 8.925.000,00
2	Penangkapan/ Nelayan	57	231	Rp. 93.757.000,00
3.	Pedagang campuran	7		
	- Pedagang ikan		10	Rp. 2.827.000,00
	- Peralatan nelayan		-	-
	- jual BBM		9	Rp. 2.925.000,00
	Jumlah	68	262	Rp. 108.434.0000,00

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2004

Beberapa dugaan yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi kurang berhasilnya implementasi program PEMP ditunjukkan oleh sebagian fenomena adanya sebagian penerima program yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan rumah tangga yang sifatnya konsumtif baik digunakan untuk membeli televisi, radio maupun untuk memperbaiki rumahnya. Penyebab dari kurang berhasilnya implementasi program tersebut diduga disebabkan oleh *pertama*, kurang intensifnya sosialisasi program kepada calon penerima program yang tidak secara menyeluruh diberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program. Kurang intensifnya komunikasi program tersebut terlihat dari adanya pertemuan sosialisasi program kepada warga penerima program PEMP yang hanya berlangsung 4 kali ketika pengenalan program dan itupun yang diundang hanya perwakilan warga saja yaitu pihak RT/ RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Sebagai akibat dari kondisi ini maksud dan tujuan program tidak secara merata diterima oleh penerima program karena pihak-pihak yang datang dalam pertemuan ada yang menyampaikan hasil-hasil pertemuan dan tidak menyampaikan hasil-hasil pertemuan sosialisasi Program PEMP.

*Kedua*, faktor yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi program PEMP disebabkan oleh kurang memadainya kemampuan pelaksana program. Kondisi kurang memadainya kemampuan para pelaksana program bisa dilihat dari sebagian sebagian besar para pelaksana program PEMP yang umumnya berpendidikan rata-rata hanya lulusan SMP, yang sebagian besar berasal dari para nelayan yang mempunyai tugas sebagai penarik angsuran dan koordinator kelompok seperti yang dijumpai di lapangan dalam menjalankan

tugasnya mereka lebih banyak bertugas pada tataran menarik angsuran tanpa melakukan proses pemahaman kebijakan dan pemberian petunjuk pelaksanaan program. Sedangkan tugas pemahaman terhadap tujuan PEMP dan mekanisme pelaksanaan lebih banyak dilakukan oleh pengurus program. Gambaran mengenai kemampuan pelaksana program dapat dilihat dari tabel I. 4 berikut:

Tabel I.4  
TINGKAT PENDIDIKAN PELAKSANA PROGRAM PEMP  
DI KELURAHAN TANJUNG MAS TAHUN 2003

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah dan Rincian	Persentase
1	SD	23 (koordinator)	32,850
2	SMP/ sederajat	38(koordinator)	54,285
3	SMA/ sederajat	7 ( 4 koordinator, 2 pengurus )	10,000
4	Perguruan tinggi	3 (pengurus )	2,850
Jumlah		71	100,000

Sumber: PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

*Ketiga*, faktor penyebab yang diduga menjadi penyebab kurang berhasilnya implementasi program PEMP adalah kurang mendukungnya sikap pelaksana program, dimana mereka menganggap program memberatkan dirinya karena dia diberi beban kerja tanpa imbalan yang seimbang mengingat kerjanya bersifat sukarela. Implikasi yang terjadi dari adanya faktor tersebut adalah menimbulkan kekurangseriusan pelaksana dalam bekerja seperti munculnya sikap malas dalam menarik angsuran pada kelompoknya. Oleh karena itu, mengingat permasalahan-permasalahan di atas tersebut, maka implementasi program tersebut merupakan fenomena yang penting untuk diteliti.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **B. 1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang kemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi menyangkut implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, yaitu antara lain:

1. Program PEMP di kelurahan Tanjung Mas dalam implementasinya kurang berhasil.
2. Proses komunikasi program kurang intensif dilaksanakan.
3. Kemampuan kerja pelaksana kebijakan kurang memadai.
4. Sikap pelaksana kebijakan kurang mendukung.

### **B. 2. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

*“Apakah kurang berhasilnya implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dipengaruhi oleh tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program?”*

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Tujuan umum

Tujuan umum dari penelitian ini, adalah untuk menganalisis apakah implementasi program PEMP (Y) dipengaruhi oleh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3).

#### b. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat komunikasi (X1), terhadap implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tingkat kemampuan kerja pelaksana program (X2) terhadap implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
4. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
5. Untuk menguji hipotesis yang diajukan.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti sendiri, adalah menambah pengetahuan tentang implementasi kebijakan publik dan menambah kertampilan peneliti dalam analisis praktis mengenai implementasi kebijakan publik untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.
- b. Bagi pihak lain, adalah penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang untuk masa yang akan datang pada khususnya dan program pemberdayaan pada umumnya.
- c. Bagi penelitian lanjutan, adalah penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang meneliti implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai bahan awal penelitian maupun literatur dalam penelitiannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Berbagai literatur baik dari ilmu politik maupun ilmu administrasi negara, para pakar memberikan definisi kebijakan publik secara berbeda-beda satu dengan yang lain. Hal ini logis karena para ahli biasanya dipengaruhi oleh karakteristik masalah yang ingin ditelaah ataupun perbedaan pendekatan dan metode penelitian yang dipengaruhi.

James Anderson (Islamy, 1992 : 17), merumuskan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaksana atau sekelompok pelaksana guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Dalam kerangka demikian, maka hakekat suatu kebijakan tidak hanya bersifat ketentuan yang harus dipatuhi oleh objek kebijakan, tetapi juga diperlukan adanya konsistensi kepatuhan seluruh pihak yang terkait.

Kemudian kebijakan memiliki orientasi pada kepentingan publik memiliki pengertian yang lebih terkait dengan produk pemerintah. Menurut Thomas R. Dye (1978 : 3) kebijakan publik diartikan sebagai:

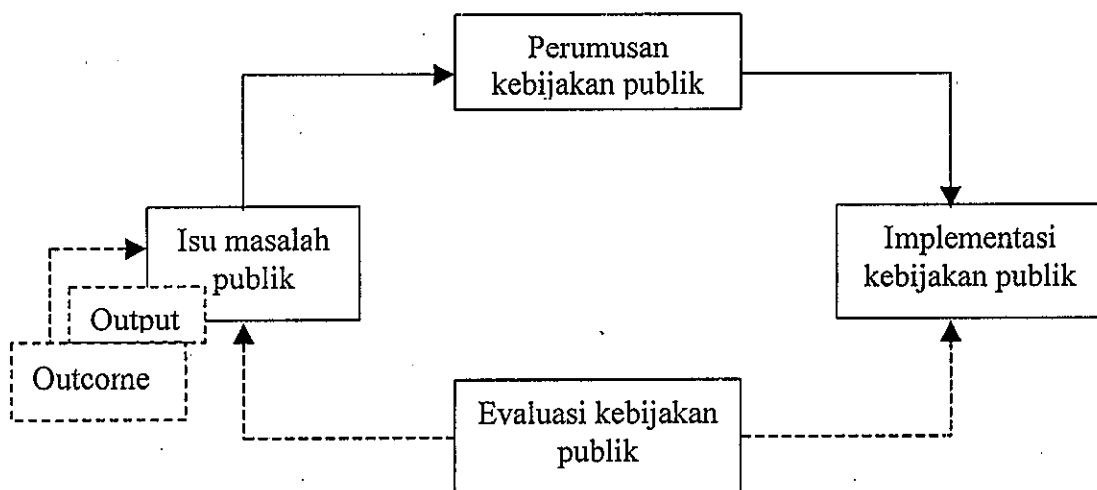
*Whatever governments choose to do or not to do* (Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan (objektifnya) dan kebijakan pemerintah itu harus meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah saja.

Sementara itu menurut Chief J. O. Udoji (Wahab, 1997: 5), mendefinisikan kebijakan-kebijakan publik sebagai tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang dipusatkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan dan mempunyai sebagian besar warga masyarakat.

Mengacu pada apa yang disampaikan di atas, maka kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memuat tentang beberapa aturan main yang melibatkan pemerintah maupun masyarakat dan untuk menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan-tuntutan yang ada dalam masyarakat, baik oleh individu maupun organisasi.

Dalam kebijakan publik terdapat siklus kebijakan publik, menurut Riant D. Nugroho (2003: 73-74), dalam tataran ideal-teoritis-metodologis yaitu tentang bagaimana siklus sematik dari kebijakan publik.

Gambar II. 1  
SKEMA  
SIKLUS KEBIJAKAN PUBLIK



Sumber: Riant D. Nugroho Tahun 2003

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

- 1). Terdapat isu atau masalah publik. Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus di selesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
- 2). Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya termasuk pimpinan negara.
- 3). Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama masyarakat.
- 4). Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.
- 5). Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dimanfaatkan oleh para pemanfaat.
- 6). Didalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Dengan melihat skema tersebut di atas kita melihat bahwa terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- 1). Perumusan kebijakan
- 2). Implementasi kebijakan
- 3). Evaluasi kebijakan.

Kemudian Budi Winarno (2002: 28–30) mengutip bukunya William Dunn (1998: 24–25), mengemukakan tahap–tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- 1). Tahap penyusunan agenda  
Para pejabat yang diangkat dan dipilih menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah–masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali dan beberapa lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
- 2). Tahap formulasi kebijakan  
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah–masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari penyelesaian masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing–masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing–masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- 3). Tahap adopsi kebijakan  
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antar direktur lembaga atau peradilan.
- 4). Tahap implementasi kebijakan  
Suatu kebijakan hanya akan menjadi catatan–catatan elit, jika program tersebut tidak dapat diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan–badan administrasi maupun agen–agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit–unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin ditentang oleh para pelaksana.
- 5). Tahap penilaian kebijakan  
Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauhmana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihasilkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran–ukuran atau kriteria–kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho D dan kutipan Budi Winarno mengenai tahap-tahap implementasi kebijakan publik dari William Dunn tersebut, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kebijakan publik dalam prosesnya menyangkut tiga hal mendasar yaitu perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Berkaitan dengan terminologi kebijakan publik tersebut di atas, yang menjadi kajian penelitian dalam tesis ini adalah tahap yang kedua dalam proses kebijakan publik yaitu implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

Berikut ini akan peneliti paparkan beberapa pendapat dari para ahli teori kebijakan sebagai landasan teori yang mendasari penelitian.

Van Meter dan Van Horn (Wahab, 1997 : 79-81), mengembangkan model yang disebut sebagai "*A model of the policy implementation process*" (model proses implementasi kebijakan), kedua ahli di atas mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variable*) yang saling berkaitan.

Variabel-variabel bebas tersebut ialah :

1. Ukuran dan tujuan kebijaksanaan,
2. Sumber-sumber kebijaksanaan,
3. Ciri-ciri atau sifat badan / instansi pelaksana,
4. Komunikasi antar instansi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
5. Sikap para pelaksana,
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik,

Penjelasan selanjutnya variabel-variabel kebijaksanaan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar organisasi berkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan didalam sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya pusat perhatian pada

sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.

Selanjutnya menurut George Edwards III (Imawan, 1999: 12), mengemukakan setidaknya ada empat variabel yang secara operasional menentukan keberhasilan / kegagalan implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Komunikasi maksudnya upaya mengalihkan (*transfer*) pemahaman tujuan kebijakan dari perencana ke pelaksana.
2. Sumber daya (*resources*) yang dimiliki, yang meliputi sumber daya, staff pelaksana lapangan, serta sumber materiil pendukung lainnya.
3. Disposisi / sikap yakni preferensi pelaksana untuk menentukan tahapan-tahapan yang paling mungkin dilakukan (*feasible*) yang boleh jadi sedikit menyimpang dari yang telah ditentukan. Penyesuaian dilakukan sejauh hal itu untuk mensiasati hambatan-hambatan yang ada di lapangan.
4. Struktur, orientasi sebagai penopang utama kebijakan publik.

Kemudian menurut Rina Martini, dkk (Yuwono dan Badjuri, 2002: 120– 126), terdapat beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kegagalan dari implementasi kebijakan publik, yaitu :

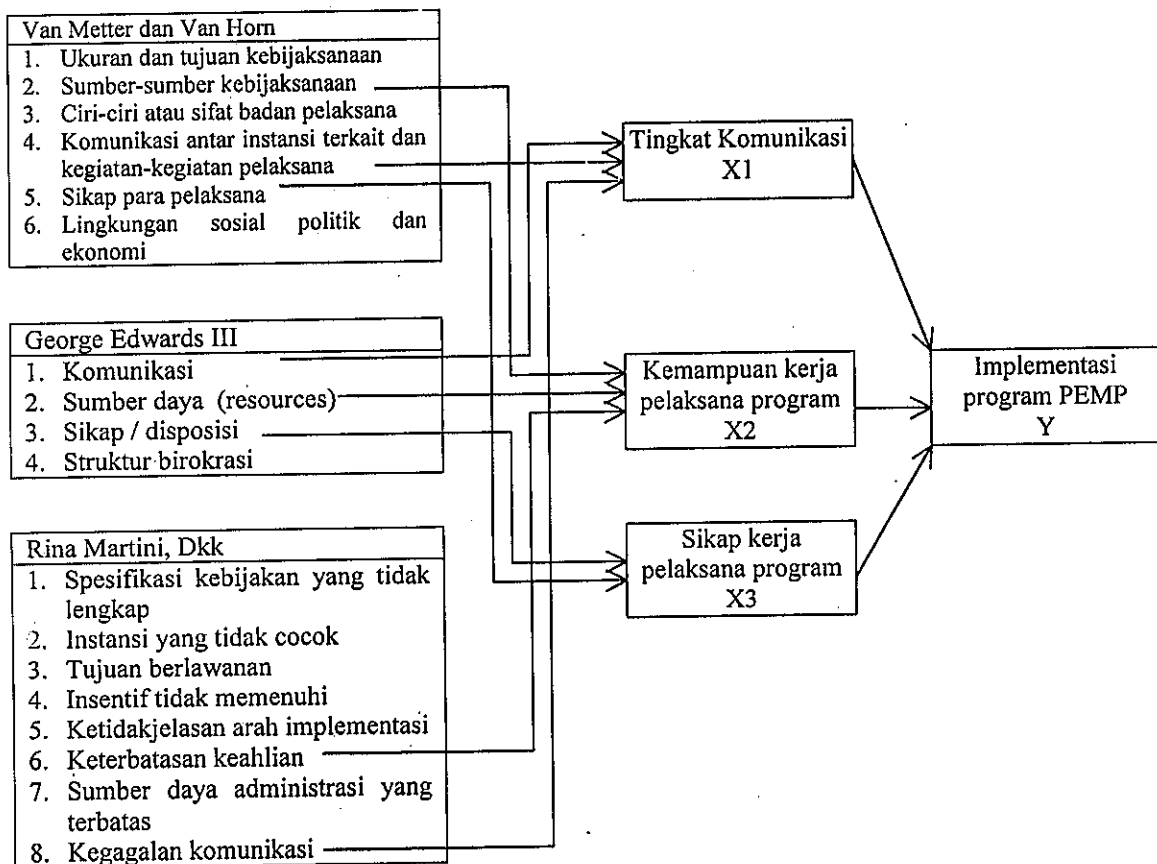
1. Spesifikasi kebijakan yang tidak lengkap
2. Instansi yang tidak cocok
3. Tujuan yang berlawanan
4. Insentif tidak memadai
5. Kebijaksanaan arah implementasi
6. Keterbatasan keahlian
7. Sumber daya administrasi yang terbatas
8. Kegagalan komunikasi

Berdasarkan paparan dari peneliti dan dengan dikaitkan rumusan masalah penelitian yang peneliti kemukakan di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel tergantung (*dependen variabel*) atau Y yaitu implementasi program, yang dihubungkan dengan variabel X (*independent variabel*) yaitu, XI tingkat komunikasi yang diturunkan dari komunikasi antar instansi, komunikasi, dan kegagalan komunikasi.

Kemudian, variabel X2 "kemampuan kerja pelaksana program, peneliti turunkan dari sumber-sumber kebijaksanaan, sumber daya (*resources*), dan keterbatasan keahlian, sedangkan untuk variabel X3 sikap kerja pelaksana program peneliti turunkan dari sikap para pelaksana dan sikap atau disposisi.

Uraian di atas jika peneliti tuangkan dalam bagan, adalah sebagai berikut :

Bagan II. 2  
BANGUN TEORI PENELITIAN  
PENGARUH TINGKAT KOMUNIKASI (X1), KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA PROGRAM (X2), DAN SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM (X3) TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PEMP (Y)



## **B. Variabel–variabel penelitian**

### **B. 1. Implementasi Program (Y )**

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan produk dari hasil keputusan pemerintah yang orientasi utamanya untuk mengatasi permasalahan publik yang dalam pengertian ini adalah permasalahan yang melingkupi masyarakat pesisir pantai yang berupa bantuan ekonomi dalam bentuk pinjaman mengingat adanya keterbatasan modal untuk mencari nafkah. Oleh karena itu dalam kajian ini pembahasan secara teoritis peneliti mencoba menjelaskannya dari terminologi kebijakan publik dari sisi implementasinya.

**Menurut Robert Denhard (1995 :253)**, implementasi kebijakan merupakan suatu tahap aksi dimana semua perencanaan yang dirumuskan menjadi kebijakan yang dioperasionalkan.

Kemudian **Daniel A. Mazmarian dan Paul A. Sabatier (Wahab, 1997: 65)**, mengemukakan makna implementasi yaitu:

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disyakkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak yang nyata pada masyarakat.

Pakar implementasi kebijakan yang lain **Van Metter dan Van Horn (Wahab, 1997: 65)**, mendefinisikan implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau individu-individu

publik atau kelompok yang ditujukan untuk pencapaian tujuan yang sebelumnya ditetapkan.

Dari definisi-definisi mengenai implementasi kebijakan publik tersebut, disimpulkan implementasi program adalah suatu tahap yang berupa aksi setelah terjadi perencanaan dalam pengesahan keputusan baik yang berhubungan dengan dampak pengadministrasiannya maupun dalam rangka memberikan dampak dari sesuatu yang ditetapkan sebelumnya.

Oleh karena itu, ternyata implementasi tersebut merupakan suatu proses dimana apa yang telah direncanakan sebelumnya dan setelah terjadinya legalitas formal kemudian dioperasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian setelah dioperasikan dalam implementasi tersebut, diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dari pada sebelum adanya kebijakan publik.

Oleh karena itu pemahaman yang dapat dipaparkan bahwa implementasi kebijakan tersebut merupakan tahap yang penting ataupun dengan kata lain rohnya kebijakan publik. Berkaitan dengan arti pentingnya implementasi kebijakan publik Chief J. O Udoji (Wahab, 1997: 59), mengemukakan, bahwa:

*Executive of policies is important if not more important than policy making will remain dreams or blue print in file jacket unless the are implemental"* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting dari pembuatan keputusan kebijakan ). Kebijakan-kebijakan hanya sekedar mimpi atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip tanpa diimplementasikan.

Kemudian dalam kaitanya dengan proses dan *outcome* dari implementasi kebijakan publik. Agus Dwianto (1999: 1), mengemukakan implementasi kebijakan publik setidaknya bisa dilihat dari dua perspektif, yaitu :

- a. Dari sudut pandang proses, yaitu menekankan pada konsistensi pelaksanaan program atau kebijakan dengan *policy guidelines* yang merupakan petunjuk dari pelaksanaan program yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksanaan kelompok sasaran dan manfaat program. Program dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan *policy guidelines*-nya.
- b. Dari sudut pandang *outcome*, suatu program dikatakan berhasil kalau program tersebut menghasilkan dampak yang diharapkan.

Selanjutnya dalam kaitanya dengan implementasi Corali Bryant (Coraly Bryant dan Louis G. White, 1988: 199), mengemukakan bahwa keberhasilan program kebijakan pembangunan dapat dilihat dari efisiensi program sebagai "*daya kerja*" yang mampu menciptakan:

- Seberapa jauh program mengembangkan lembaga yang mampu menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan baru dari waktu ke waktu.
- Keefektifan program dalam menjangkau kelompok-kelompok target yang jelas dan tertentu.
- Banyaknya perubahan perilaku yang terjadi.
- Apakah organisasi telah memetik pelajaran dari pengalaman proyek dan mengubah keputusan sesuai dengan tugas pembangunan.
- Apakah program berhasil dalam menggerakkan dan mengarahkan partisipasi masyarakat serta menambah kesadaran mereka mengenai kemampuan mereka sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan pendapat dari Agus Dwianto tersebut dalam penelitian ini variabel implementasi program (Y) sebagai indikatornya, yaitu:

1. Implementasi kebijakan dari sudut pandang proses, melihat bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan, petunjuk pelaksanaannya apakah tidak rumit, pemenuhan syarat-syarat bagi penerima program mudah/ tidak dipenuhi serta apakah program dalam implementasinya telah melibatkan partisipasi aktif penerima program dan membawa manfaat bagi penerimanya.
2. Implementasi dari sudut pandang *outcome*, melihat bagaimana hasil yang muncul dari adanya implementasi program apakah lembaga pelaksana mampu memberikan jasa-jasa pelayanan kredit, penerima memenuhi kewajibannya mengangsur kredit, program mampu mengurangi kesulitan modal, program mampu meningkatkan pendapatan penerima kredit, mampu mengurangi kesulitan ekonomi penerima kredit, serta program mampu menimbulkan kesadaran mengenai arti pentingnya program pembangunan.

## B. 2. Tingkat Komunikasi (X1)

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik. Dengan adanya komunikasi yang baik diharapkan hal-hal yang menyangkut kebijakan dalam implementasinya informasi/ pesan-pesan dapat tersampaikan dengan efektif diterima oleh penerima program sehingga akan terjadi persamaan persepsi antara pemberi program dan penerima program. Aspek lain yang ingin dicapai dari komunikasi tersebut yaitu diterimanya program oleh masyarakat yang pada akhirnya menimbulkan gerak untuk melakukan sesuatu yang sifatnya positif dari penerima program untuk berpartisipasi terhadap kebijakan pemerintah. Artinya dalam hal ini komunikasi yang baik akan dapat menimbulkan suatu proses kesalingpahaman dari pemerintah kemasyarakat ataupun dari masyarakat ke pemerintah.

**Menurut Miftah Thoha (1990: 115),** bahwa:

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau info dari seseorang kepada orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi kalau pihak penyampai berita tadi menyampaikan secara tidak patut dan penyampai berita tidak menerimanya dalam bentuk distorsi.

Kemudian **Edwin Filippo (Jiwanto, 1985: 85),** mendefinisikan komunikasi, yaitu sebagai suatu tindakan mendorong pihak lain untuk menginterpretasikan suatu ide dalam suatu cara yang diinginkan oleh pembicara ataupun penulis.

Selanjutnya **George Edwards III (Winarno, 2002: 86),** mengemukakan definisi komunikasi dari sudut pandang proses yaitu:

Pihak-pihak yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diterapkan kepada personel yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah dapat diikuti dan komunikasi tersebut harus jelas dan konsisten.

Berdasarkan pendapat-pendapat mengenai definisi-definisi komunikasi maka dapat disimpulkan bahwa tingkat komunikasi yaitu, suatu proses penyampaian berita atau info serta ide-ide mengenai suatu program secara jelas dan konsisten sehingga diperoleh pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan.

Terdapat empat arus komunikasi dalam suatu organisasi menurut **Sondang P. Siagian (2000: 307)**, yaitu:

1. Komunikasi vertikal ke bawah.

Komunikasi ini merupakan wahana bagi pimpinan untuk menyampaikan berbagai hal kepada bawahan seperti perintah, instruksi, kebijaksanaan baru, pengarahan, pedoman kerja, nasehat, teguran dan pujian.

2. Komunikasi vertikal ke atas.

Para pekerja dalam organisasi juga ingin didengar oleh atasannya. Keinginan demikian dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai hal seperti laporan hasil kerja, masalah yang dihadapi baik kedinasan atau permasalahan pribadi, saran-saran yang menyangkut tugas, bahkan kritik yang membangun kepentingan organisasi.

3. Komunikasi horizontal.

Komunikasi ini berlangsung antara orang-orang yang berada pada tingkat yang sama dalam hierarki organisasi, akan tetapi melaksanakan tugas yang berbeda.

4. Komunikasi diagonal.

Komunikasi ini antara dua satuan kerja yang berada pada jenjang hierarki organisasi yang berbeda, tetapi menyelenggarakan kegiatan yang sejenis.

Komunikasi yang terjadi dalam kaitanya dengan implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) antara para pelaksana program dengan penerima program adalah komunikasi vertikal,

sedangkan komunikasi yang terjadi antar penerima program adalah komunikasi horisontal. Komunikasi vertikal kebawah disini berarti proses komunikasi yang dilakukan aparat pelaksana program kepada penerima program. Sedangkan komunikasi horizontal menyangkut komunikasi yang terjadi antar penerima program akan tetapi pada jenjang tugas yang sama yaitu sesama penerima program .

Dalam proses komunikasi terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif menurut **S. Yuwono (1985: 11)**, dalam buku *Ikhtisar Komunikasi dan Administrasi* yaitu:

1. Kejelasan (*clarity*)

Supaya informasi dapat diterima dengan betul dan mudah maka penyampaiannya harus jelas yaitu dengan kalimat yang terang dan tidak berbelit.

2. Kecukupan (*adequancy*)

Penyampaian informasi hendaknya berpedoman pula kepada asas memadai kebutuhan atau dapat menyampaikan maksud penyampaian dengan baik dan cukup.

3. Penggunaan waktu yang setepat-tepatnya (*timing*)

Komunikator harus mempertimbangkan waktu setepat-tepatnya dalam penyampaian informasi.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut di atas dari beberapa definisi komunikasi para ahli dan ukuran komunikasi yang efektif maka variabel tingkat komunikasi (X2) sebagai indikatornya, yaitu:

1. Tingkat pemahaman terhadap program, dilihat dari apakah penerima program mengerti dan paham terhadap program yang diberikan.

2. Tingkat kejelasan, dilihat dari apakah proses penyampaian informasi program dalam implementasi program jelas diterima oleh penerima program.
3. Tingkat kecukupan, dilihat dari apakah penyampaian informasi kebijakan menggunakan media yang memadai dan apakah penerima program cukup mendapat informasi mengenai program.
4. Tingkat ketepatan, dilihat dari apakah pelaksana program dalam memberikan informasi sesuai dengan apa yang tertera dalam program PEMP, apakah media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan program tepat digunakan, dan apakah frekuensi penyampaian informasi yang dilakukan pelaksana program rutin dilakukan.

### B.3. Kemampuan kerja pelaksana program (X2)

Mengenai Kemampuan biasanya menyangkut kualitas yang dimiliki seseorang yaitu menyangkut potensi dalam pekerjaan dan tugas.

Kemampuan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan keterampilan. Pendapat ini dikemukakan oleh **Richard M. Steers (1985: 147)**, bahwa kemampuan seseorang juga banyak ditentukan oleh ciri-ciri yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan, seperti kemampuan, perangai dan sifat kerjanya.

Kemudian **A. S. Moenir (1987: 76)**, mendefinisikan kemampuan yaitu kemampuan dalam hubungannya dengan pekerjaan ialah suatu keadaan seseorang yang penuh kesungguhan berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal.

Selanjutnya **James L. Gibson (1990: 55)**, mendefinisikan kemampuan kerja yaitu, sifat yang dibawa sejak lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang melaksanakan pekerjaan/ menyelesaikan sesuatu yang bersifat mental maupun fisik.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut maka, disimpulkan kemampuan kerja pelaksana program adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh pelaksana program dalam melaksanakan program atau kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kemudian untuk menjelaskan kemampuan yang dimiliki seseorang bahwa kemampuan tersebut perlu sekali untuk dijelaskan atau dijabarkan sehingga mengandung pengertian yang tidak abstrak. **James L. Gibson (1990: 55)**, menjelaskan tentang 3 (tiga) macam kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparat dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas kerja yaitu:

1. Kemampuan berinteraksi yang meliputi, hal-hal sebagai berikut:
  - Kemampuan seorang untuk menciptakan dan menjaga hubungan pribadi
  - Kemampuan komunikasi seorang aparat untuk berkomunikasi dengan rekanya secara efektif.
  - Kemampuan seorang aparat untuk menangani konflik-konflik baik dengan orang lain maupun rekanya.
2. Kemampuan konseptual meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - kemampuan seseorang aparat untuk menerima dan menganalisis informasi baik dari dalam maupun dari lingkungan luar organisasi
  - Kemampuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
  - Kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pekerjaan yang perlu dalam organisasi.
3. Kemampuan administrative meliputi, hal-hal sebagai berikut:
  - Kemampuan seorang aparat untuk mengembangkan dan mengikuti rencana- rencana kebijakan dan prosedur secara efektif
  - Kemampuan untuk memproses tata warkat atau kertas kerja dengan baik, teratur dan tepat waktu.
  - Kemampuan untuk menggunakan pengetahuannya, peralatan-peralatan, pengalaman, dan teknis-teknis dari berbagai ilmu untuk memecahkan masalah.

Selanjutnya **Wahyu Sumidjo (1987: 144-145)**, berpendapat bahwa kemampuan yang harus dimiliki yang berhubungan dengan kedudukan/ jabatan dalam organisasi adalah:

1. Kemampuan teknik (*technical ability*), yaitu kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian dalam mempergunakan berbagai alat/ sarana dan teknik-teknik yang bersifat khusus.
2. Kemampuan hubungan antar manusia (*human skill*), yaitu kemampuan yang di dalamnya mencerminkan berbagai ketrampilan seperti:
  - a. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain.
  - b. Kemampuan menciptakan kesadaran dan rasa kebersamaan.
  - c. Kemampuan menciptakan suasana kerja di mana seluruh aparat merasa aman, tidak dipaksa, tidak dicurigai, suasana kerja yang kekeluargaan, toleransi kerja dan saling percaya.
3. Kemampuan konseptual dan desain (*conceptual and design skill*), yaitu:
  - a. *Conceptual skills* adalah kemampuan pengelolaan, yang berkaitan dengan kemampuan melihat segala sesuatu secara makro, secara sistem atau secara lintas sektoral.
  - b. *Design skills* adalah kemampuan seseorang yang tidak hanya difokuskan untuk melihat, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang timbul, tetapi juga sekaligus mampu merumuskan berbagai alternatif memecahkan permasalahan itu sendiri.

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan mengenai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang menurut James L. Gibson dan kemampuan yang harus dimiliki seseorang dalam organisasi menurut Wahyu Sumidjo tersebut, maka indikator dari tingkat kemampuan kerja pelaksana program adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan teknis, dilihat dari kemampuan dalam membantu memproses persyaratan kredit dan kemampuan dalam menerima dan menganalisis informasi dari penerima program.
2. Kemampuan berinteraksi, dilihat dari kemampuan dalam bersilatuhrahmi dengan penerima program, menjalin kerjasama dengan penerima program, menangani konflik yang terjadi antar penerima program, memberikan kesadaran dan kesabaran kepada penerima

program, serta kemampuan dalam memahami keluhan penerima program.

3. Kemampuan konseptual, dilihat dari kemampuan dalam penyampaian ide-ide pembaharuan dan merumuskan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam implementasi program.

4. Kemampuan administratif, dilihat dari kemampuan dalam mengikuti mekanisme implementasi program dan kemampuan dalam mengarsipkan kertas kerja implementasi program.

#### B. 4. Sikap kerja pelaksana program (X3)

Sikap (Azwar, 1988: 3), menurut (1) Gordon Alfort, didefinisikan sebagai semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu. (2) Louis Thurstone dan Charles Ogwood mendefinisikan sikap, yaitu suatu bentuk evaluasi dan reaksi perasaan. Kemudian (3) Berkovitz mendefinisikan sikap sebagai perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) ataupun perasaan perasaan objek tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sikap kerja pelaksana program yaitu, sikap yang dimiliki seseorang pelaksana program dalam melihat sesuatu reaksi secara mental sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu program tertentu.

Selanjutnya, dalam kaitanya dengan kebijakan publik Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 118), mengemukakan tentang tanggapan pelaksana kebijakan yang mungkin mempengaruhi keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni:

1. Kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan
2. Macam-macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan)
3. Intensitas terhadap tanggapan.

Dilihat dari strukturnya, sikap terdiri dari tiga komponen yang saling menunjang, yaitu : komponen kognitif, komponen afektif dan

komponen konatif menurut Azwar (1988: 17) atau Myers (Sarwono, 1998: 234), memberikan istilah yang lebih mudah diingat, yaitu *ABC*. A merujuk pada *Affective* (perasaan), B pada *Behavior* (perilaku) dan C pada *Cognitive* (kesadaran), adalah:

1. Komponen kognitif berisi persepsi, kepercayaan dan *stereotype* yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Seringkali komponen ini disamakan dengan pandangan atau opini.
2. Komponen afektif mengangkat masalah emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap. Komponen ini disamakan dengan perasaan yang dimiliki orang terhadap suatu obyek.
3. Komponen konatif atau perilaku dalam sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapi.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas tentang sikap dalam hal ini dihubungkan dengan implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dapat di ukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Komponen kognitif, menjadi pelaksana kebijakan PEMP sesuai dengan keyakinan diri serta menjelaskan persepsi mereka terhadap PEMP yang dilaksanakan.
2. Komponen afektif, menjadi pelaksana kebijakan PEMP menilai kebijakan ini sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang dianut.
3. Komponen konatif, kecenderungan perilaku pelaksana kebijakan PEMP dengan cara bersikap dan bertingkah laku melayani penerima program mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan.
4. Tanggapan pelaksana program terhadap PEMP

B. 5. Pengaruh tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi program  
(Y)

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam implementasi kebijakan publik karena jika dilihat dari maknanya komunikasi merupakan suatu langkah dalam usaha menyebarluaskan informasi maupun data. Dalam konteks implementasi kebijakan publik tentunya kebijakan tersebut mampu dimengerti dan dipahami secara jelas apabila transfer informasi kebijakan yang diberikan efektif, sehingga apabila ini terjadi akan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi suksesnya suatu implementasi kebijakan publik.

Mengenai arti pentingnya variabel komunikasi ini ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli kebijakan publik. **George Edwards III** seperti dikutip **Winarno (2002: 126-127)**, menjelaskan bahwa:

Persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah bahwa pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima oleh para pelaksana, kemudian jika kebijakan akan diterapkan, maka perintah kebijakan harus diterima dengan jelas (*clarity*) selain itu perintah penerapan harus konstant.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administrasi dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sementara itu ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan.

Kemudian dalam penjelasan Teguh Yuwono dan Abdul kahar Badjuri (2002), adalah sesuatu yang sulit dibantah jika tidak ada komunikasi yang baik dalam implementasi kebijakan maka tinggal menunggu waktu kegagalan kebijakan publik artinya jika komunikasi tidak berjalan baik harapan untuk berhasil hanya spekulasi atau keberuntungan yang tidak terduga.

Oleh karena itu jadi jelaslah bahwa komunikasi adalah salah satu prasyarat yang menjamin sukses tidaknya implementasi kebijakan publik. Artinya implementasi program pemerintah salah satunya dipengaruhi oleh faktor tingkat komunikasi.

#### B.6. Pengaruh kemampuan kerja pelaksana program (X2) terhadap implementasi program (Y)

Kemampuan kerja pelaksana program merupakan salah satu faktor yang penting menentukan sukses tidaknya implementasi kebijakan publik. Suatu implementasi kebijakan publik apabila didukung oleh adanya kemampuan kerja aparat pelaksana kebijakan yang memadai baik secara konseptual, teknis maupun administratif maka dapatlah kita pahami akan memberikan kemungkinan yang baik dalam memberikan kontribusi yang positif bagi implementasi kebijakan publik tersebut. Tetapi sebaliknya apabila dalam implementasi kebijakan publik tersebut tidak didukung oleh adanya kemampuan kerja yang memadai dari pelaksana kebijakan baik secara konseptual, administratif maupun teknis maka kemungkinan yang terjadi

akan menghambat implementasi kebijakan publik sehingga kesuksesan implementasi sulit terjadi atau tidak terjadi.

Faktor penting bagi keberhasilan pembangunan adalah manusia maka dari itu mengingat kebijakan adalah produk pemerintah untuk mengatasi persoalan masyarakat yang ada kaitanya dengan pembangunan maka disini peran kualitas manusia menjadi prasyarat bagi kesuksesan implementasi kebijakan publik.

Dalam kontek yang demikian tersebut inilah maka seorang pelaksana kebijakan haruslah dipilih orang-orang yang setidaknya mempunyai pengetahuan atau ketrampilan yang sesuai dengan persyaratan untuk menjalankan sebuah kebijakan publik sehingga dia mampu menterjemahkan kebijakan publik tersebut secara benar dalam implementasi program, maka dengan adanya keadaan ini harapan suksesnya implementasi kebijakan lebih besar peluangnya dapat terwujud.

Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa kemampuan kerja pelaksana kebijakan merupakan faktor yang berpengaruh ikut serta menentukan bagi sukses tidaknya implementasi kebijakan publik.

B. 7. Pengaruh sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementai program (Y)

Sikap kerja pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang ikut serta menentukan terhambat maupun tidak terhambatnya bagi sukses tidaknya implementasi kebijakan publik. Suatu implementasi kebijakan publik apabila didukung oleh adanya sikap yang mendukung atau positif dari para pelaksana kebijakan maka kemungkinan yang terjadi akan memperlancar implementasi kebijakan publik sehingga kondisi yang terjadi kemungkinan suksesnya implementasi akan lebih berpeluang tercapai. Namun demikian sebaliknya apabila dalam implementasi kebijakan publik tidak didukung oleh adanya sikap yang positif dari para pelaksana kebijakan maka peluang terhambatnya implementasi semakin terbuka lebar sehingga kondisi gagalnya implementasi berpeluang dapat terjadi.

**George Edwards III** mengemukakan pentingnya sikap dalam implementasi kebijakan dengan bahasanya seperti yang maknakan oleh **Budi Winarno (2002:142)**, bahwa:

Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu. Dan hal ini adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perpektif-perpektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan kebijakan jadi semakin sulit.

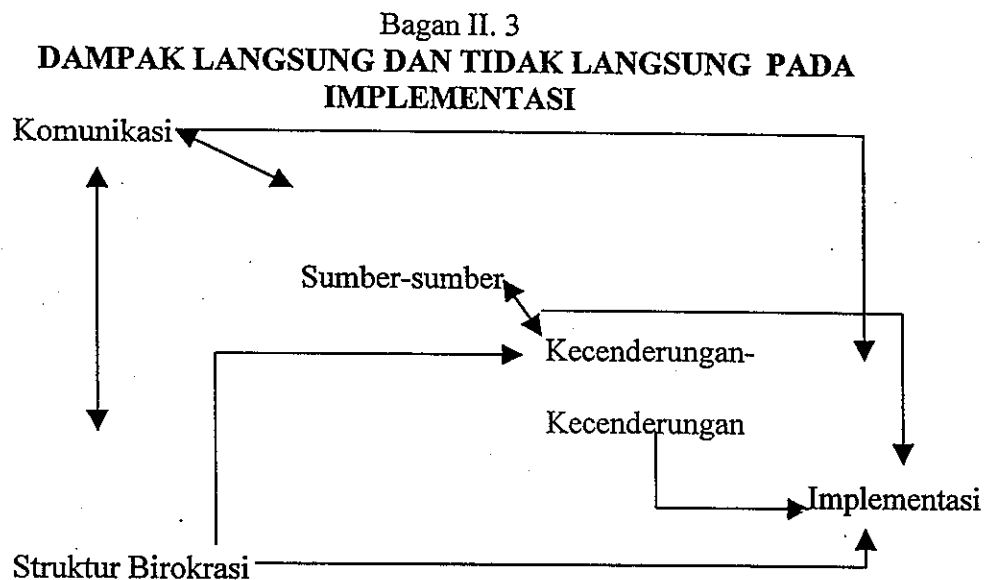
Oleh karena itu, variabel sikap kerja pelaksana kebijakan merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan terhambat tidak terhambatnya dan sukses tidaknya implementasi kebijakan publik.

B. 8. Pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program (Y)

Tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana dan sikap pelaksana kebijakan merupakan variabel-variabel yang menentukan terhambat tidak terhambatnya dan sukses tidaknya suatu implementasi kebijakan publik.

Budi Winarno (2002: 154-157), mengemukakan pendapatnya bahwa:

Mengenai interaksi-interaksi tentang faktor-faktor yang memberikan peranan dalam proses implementasi. Satu tinjauan yang singkat dari beberapa hubungan dari faktor-faktor ini terhadap satu sama lain akan menjelaskan peranan mereka dalam implementasi.



Sumber: Winarno, 2002

Dampak dari komunikasi-komunikasi tidak hanya langsung, tetapi juga dirasakan melalui kaitan-kaitan (*lingkages*) dengan sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan dan stuktur-struktur birokrasi.

Sumber-sumber mungkin mempengaruhi peran-peran kecenderungan dalam implementasi. Jika sumber-sumbernya banyak, individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam implementasi akan relatif kurang untuk bersaing dan mempertahankan kepentingan-kepentingan pribadi dan organisasi mereka. Sebaliknya staff yang terbatas dan kurangnya wewenang akan kemampuan para pejabat untuk mengontrol pejabat dibawahnya, apakah dengan memantau perilaku, memberikan insentif-insentif, atau menggunakan sangsi-sangsi. Kondisi ini akan mendorong kesempatan kepada implementasi yang lebih merefleksikan kecenderungan-kecenderungan para pejabat yang berasal dari yuridiksi tingkat yang lebih rendah.

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana akan berpengaruh pada bagaimana para pelaksana pesan-pesan komunikasi yang mereka terima. Cara pelaksana menafsirkan pesan komunikasi ini pada akhirnya akan berpengaruh pada cara bagaimana mereka menyusun kemabali pesan-pesan komunikasi untuk diteruskan pada pejabat dibawahnya. Disinilah pengaruh-pengaruh kecenderungan itu pada komunikasi yang pada akhirnya juga akan berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hal di atas, dapat dipahami setidaknya dalam implementasi kebijakan dukungan tingkat komunikasi yang efektif, kemampuan kerja pelaksana program yang memadai baik secara konseptual maupun teknis serta didukung oleh adanya sikap positif dari pelaksana program maka peluang lancarnya dan suksesnya implementasi kebijakan akan lebih terbuka terjadi. Demikian pula sebaliknya, implementasi kebijakan tidak didukung oleh tingkat komunikasi yang efektif, kemampuan kerja pelaksana program yang memadai baik secara konseptual maupun teknis serta tidak didukung oleh adanya sikap positif dari pelaksana program maka peluang terhambat dan gagalnya implementasi kebijakan akan lebih terbuka terjadi.

Pemahaman yang dapat dijelaskan disini adalah bahwa faktor komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program memegang peranan yang penting dalam implementasi. Artinya sukses tidaknya implementasi kebijakan ditentukan oleh ketiga faktor tersebut dimana jika ketiga faktor tersebut bermasalah atau tidak berjalan secara efektif maka kesuksesan implementasi merupakan keadaan yang sifatnya suatu kebetulan saja.

Oleh karena itu, dapatlah kita pahami bahwa tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana kebijakan dan sikap pelaksana kebijakan merupakan variabel-variabel yang mempunyai pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik.

## **B. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian merupakan hal yang penting karena dapat memberikan arah kepada penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989; 46), bahwa:

Dengan hipotesis kita dapat mengukur variabel-variabel penelitian sehingga pengujian penelitian dapat dilakukan secara baik dan sistematis. Selain itu hipotesis pada dasarnya menerangkan hubungan untuk menggambarkan suatu fenomena sosial dimana hipotesis merupakan suatu prediksi yang dapat di uji secara empiris.

Pemaparan di atas pada dasarnya mengandung arti hipotesis merupakan sebuah pernyataan yang berupa simpulan sementara, sifatnya masih lemah maka perlu diuji kebenarannya secara empiris.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis verbal

a. Hipotesis Minor

- a. Terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Terdapat pengaruh kemampuan kerja pelaksana program (X2) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- c. Terdapat pengaruh sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

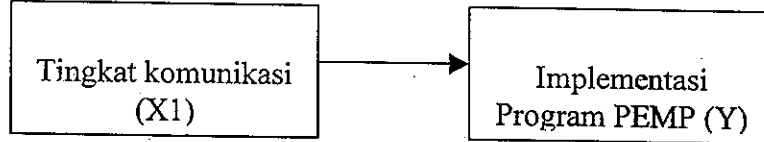
b. Hipotesis mayor

“terdapat pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.”

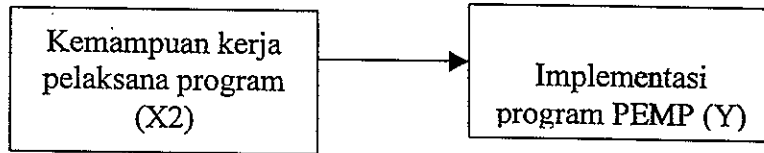
b. Hipotesis Geometrikal

a. Hipotesis Minor

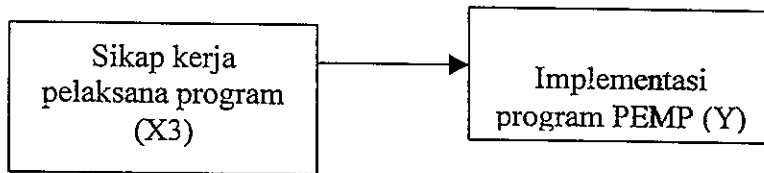
a.1.



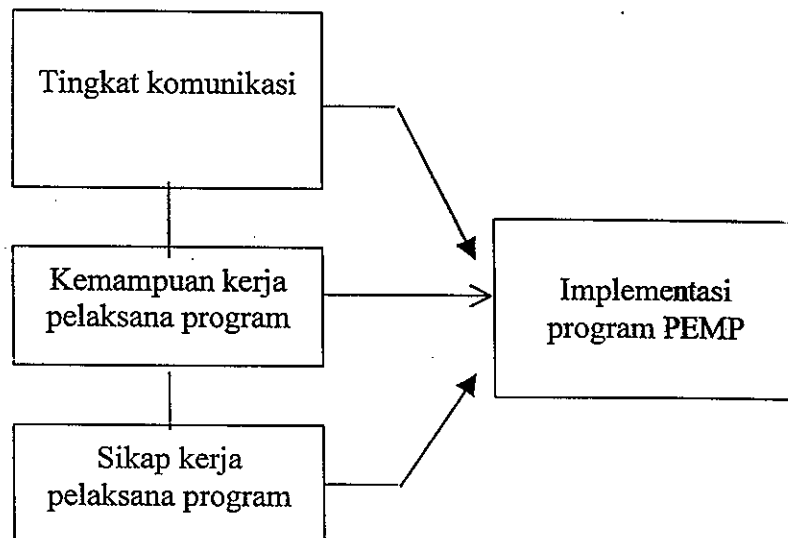
a.2.



a.3.



b. Hipotesis Mayor



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian pada hakekatnya merupakan penggambaran cara-cara seseorang peneliti guna memenuhi tujuan studi yang ditetapkan atau dengan kata lain rancangan penelitian merupakan suatu rencana logis untuk menguji hipotesis. Sehingga dengan melihat rancangan penelitian dapat diketahui arah dan tujuan penelitian, tipe, dan jenis penelitian.

Menurut Masri Singarimbun (Singarimbun dan Effendi, 1982: 61), tipe penelitian dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tipe penelitian eksploratif atau tipe penelitian penjajagan. Penelitian penjajagan bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa.
2. Tipe deskriptif, penelitian ini biasanya mempunyai dua tujuan yang pertama adalah mengetahui perkembangan tujuan atau frekuensi terjadinya sesuatu aspek fenomena sosial tertentu, kedua adalah untuk mendeskripsikan secara terperinci eksplanatory/ penjelasan.
3. Tipe penelitian eksplanatory/ penjelasan, penelitian ini menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan menguji hipotesa yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatory (penjelasan). Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antar variabel-variabel penelitian serta menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **B. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini ruang lingkungnya yaitu berusaha sebatas mengetahui pengaruh tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2) dan sikap kerja pelaksana program (X3) terhadap implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP).

## **C. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit ruang lingkup dalam pembahasan dan sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang ingin diteliti. Disamping itu lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkau penelitian, dengan tempat tinggal, waktu yang tersedia, dukungan data atau kemudahan untuk memperoleh data di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini bertempat Di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

## **C. Variabel Penelitian**

### **1. Variabel-variabel penelitian**

Variabel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Variabel tergantung, yaitu implementasi program (Y)
- 2) Variabel bebas, yang meliputi :
  - a. Tingkat komunikasi (X<sub>1</sub>)
  - b. Kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>)
  - c. Sikap kerja pelaksana program (X<sub>3</sub>)

## 2. Definisi Konseptual

- a. Implementasi program adalah suatu tahap yang berupa aksi setelah terjadi perencanaan dalam pengesahan keputusan baik yang berhubungan dengan dampak pengadministrasiannya maupun dalam rangka memberikan dampak dari sesuatu yang ditetapkan sebelumnya.
- b. Tingkat komunikasi adalah suatu proses penyampaian berita atau info serta ide-ide secara jelas dan konsisten dalam implementasi program sehingga diperoleh pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan.
- c. Kemampuan kerja pelaksana program adalah suatu kondisi atau keadaan yang menunjukkan tingkat kemampuan dan kemauan yang dimiliki oleh pelaksana program dalam melaksanakan program yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Sikap kerja pelaksana program adalah sikap yang dimiliki seseorang pelaksana program dalam melihat sesuatu reaksi secara mental sehingga muncul suatu perasaan mendukung ataupun tidak mendukung suatu program tertentu.

## 3. Definisi operasional

- a. Implementasi program (Y), variabel ini indikatornya :
  1. Implementasi kebijakan dilihat dari sudut pandang proses, indikator ini diukur dengan:
    - a). Tingkat pengetahuan penerima program

- b). Tingkat kesesuaian implementasi program dengan rencana program.
  - c). Tingkat kelancaran program PEMP diimplementasikan dilapangan.
  - d). Tingkat kemudahan penerima program dalam memenuhi persyaratan kredit PEMP
  - e). Tingkat implementasi program sudah melibatkan partisipasi aktif penerima program secara maksimal
  - f). Tingkat manfaat program bagi penerima program
2. Implementasi kebijakan dilihat dari sudut pandang hasil, indikator ini diukur dengan:
- a). Tingkat lembaga pelaksana program mampu menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan kredit bagi penerima program
  - b). Tingkat penerima program memenuhi kewajibanya mencicil kredit.
  - c). Tingkat program mampu mengurangi kesulitan modal masyarakat penerima kredit.
  - d). Tingkat program mampu meningkatkan pendapatan penerima program
  - e). Tingkat program mampu mengurangi kesulitan ekonomi penerima program

- f). Tingkat program mampu menimbulkan kesadaran penerima program mengenai arti pentingnya program pembangunan.
- b. Tingkat Komunikasi (X1), variabel ini indikatornya:
1. Pemahaman pelaksana program, diukur melalui:
    - Tingkat penguasaan informasi kebijakan yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan
    - Tingkat pemahaman pelaksana program terhadap pelaksanaan PEMP.
  2. Kejelasan, diukur melalui:
    - Tingkat kejelasan pelaksana program dalam menyampaikan pesan program.
    - Tingkat penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami yang dilakukan pelaksana program dalam penyampaian program.
    - Tingkat kerincian informasi yang diberikan pelaksana kepada penerima program.
  3. Kecukupan, diukur melalui:
    - Tingkat kecukupan penerima program mendapat informasi mengenai program.
    - Tingkat kecukupan media komunikasi yang digunakan memadai dalam implementasi program.

4. Ketepatan, diukur melalui:
  - Tingkat konsistensi pelaksana program dalam menyampaikan pesan-pesan program.
  - Tingkat ketepatan penggunaan media dalam menyampaikan pesan.
  - Tingkat frekuensi penyampaian pesan program kepada penerima program.
  
- c. Kemampuan kerja pelaksana program (X2), variabel ini indikatornya:
  1. Kemampuan teknis, diukur melalui:
    - Tingkat kemampuan pelaksana program dalam membantu memproses persyaratan kredit
    - Tingkat kemampuan untuk menerima informasi dari penerima program
  
  2. Kemampuan berinteraksi, diukur melalui:
    - Tingkat kemampuan pelaksana program dalam bersilaturahmi dengan penerima program.
    - Tingkat kemampuan dalam menciptakan kerjasama dengan penerima program
    - Tingkat kemampuan dalam menyelesaikan konflik antar penerima program.
    - Tingkat kemampuan dalam menciptakan kesabaran penerima program

- Tingkat kemampuan pelaksana program dalam menerima keluhan penerima program.
3. Kemampuan konseptual, diukur melalui
- Tingkat kemampuan pelaksana program dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan untuk memperlancar pelaksanaan program.
  - Tingkat kemampuan pelaksana program untuk merumuskan solusi jika ada permasalahan
4. Kemampuan administratif, diukur melalui:
- Tingkat kemampuan pelaksana program dalam mengikuti prosedur mekanisme pelaksanaan program.
  - Tingkat kemampuan pelaksana program dalam mengarsip kertas kerja pelaksanaan program.
- d. Sikap kerja pelaksana program (X3), variabel ini indikatornya:
1. Komponen kognitif, dapat diukur dari :
- 1) Tingkat kesesuaian pelaksana program sesuai dengan pendapat pribadi dan kepercayaan yang dianut.
  - 2) Tingkat pandangan positif pelaksana program terhadap program PEMP.
  - 3) Tingkat kepercayaan para pelaksana program bahwa kebijakan PEMP akan membawa perubahan yang positif.

2. Komponen afektif, dapat diukur dengan:

- 1) Tingkat ketidakbertentangan pelaksana program terhadap norma-norma yang dianutnya.
- 2) Tingkat pelaksana program merasa kebijakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

3. Komponen konatif, diukur dengan:

- 1) Tingkat intensitas pelaksana program dalam menarik cicilan PEMP.
- 2) Tingkat pelaksana program menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tertera dalam peraturan program.
- 3) Tingkat kerjasama pelaksana program dengan penerima program.

4. Bentuk tanggapan pelaksana program terhadap PEMP, diukur dari:

- 1). Tingkat pelaksana program menerima proyek dengan sepenuh hatinya
- 2). Tingkat pelaksana program bersikap netral dengan tidak membedakan siapa yang berhak menjadi penerima PEMP
- 3). Pelaksana kebijakan tidak mempengaruhi penerima PEMP untuk menentang kebijakan.

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini pada pokoknya digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu :

- a. Data kuantitatif, yaitu data yang berasal dari hasil jawaban responden penelitian dari daftar pertanyaan/ kuesioner yang dibagikan kepada para responden penelitian.
- b. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil jawaban dari wawancara ataupun *interview guide* terhadap sumber data.

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif karena penelitian ini menggunakan instrumen penelitian yang berupa kuesioner.

### 2. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui kuesioner.
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah oleh pihak lain diluar penelitian ini, bisa diperoleh dari literatur-literatur (brosur, buku, majalah dan dokumen) yang ada hubungannya dengan penelitian.

## **E. Instrumen Penelitian.**

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan dalam wujud kuesioner yang didasarkan pada skala pengukuran yang kuantitatif. Instrumen penelitian tersebut digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti.

Menurut Sugiono (1994: 70), terdapat 4 (empat) jenis skala pengukuran variabel, yaitu:

1. Skala pengukuran nominal atau penggolongan.
2. Skala pengukuran ordinal (penggolongan dan urutan)
3. Skala pengukuran interval (penggolongan, ukuran dan jarak)
4. Skala pengukuran ratio (penggolongan, ukuran, jarak dan ratio)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan skala pengukuran ordinal. Kuesioner tersebut menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat utama dengan menggunakan pertanyaan terstruktur baik terbuka maupun tertutup, sedangkan pertanyaan terstruktur tertutup memuat nilai yang akan diskor. Untuk mendapatkan skor dari semua jawaban responden, setiap pertanyaan memuat 4 (empat) alternatif jawaban penggolongan dan urutan dari jawaban terbaik hingga terburuk.

Berikut ini kategori jawaban yang memuat penggolongan dan urutan, yaitu:

1. Kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 4 (empat).
2. Kategori jawaban yang cukup mendukung diberikan skor 3 (tiga).
3. Kategori jawaban yang kurang mendukung diberikan skor 2 (dua).
4. Kategori jawaban yang tidak mendukung diberikan skor 1 (satu).

Kategori jawaban dapat berubah sesuai dengan kebutuhan, misal (sering, cukup sering, kadang-kadang, tidak pernah) dan seterusnya.

#### **F. Populasi dan Cara Sampling dan Teknik Pengambilan Sampel**

- a. Populasi atau *universe*, menurut Ida Bagus Mantra dan Kasto (Singarimbun, 1989: 152) adalah jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Penelitian ini sebagai populasinya adalah seluruh masyarakat penerima program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
- b. Cara Sampling, menurut M. Subana dan Sudrajat S. (2001: 115) adalah cara mengumpulkan data dari populasi dengan mengambil sebagian saja dari anggota populasi. Jadi dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti nantinya hanya akan mengambil sebagian saja dari anggota populasi yang dianggap mewakili penelitian.
- c. Teknik pengambilan sampel, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dipenelitian ini adalah *Proportional Random Sampling*, yaitu pengambilan sampel dilakukan secara proporsional mengingat populasi penelitian terdiri dari berbagai penerima program di tingkat kelurahan.

Unsur-unsur samplingnya adalah sebagai berikut:

##### **1. Elemen Penelitian**

Merupakan satuan-satuan sampel yang ada dalam populasi, yaitu satuan terkecil yang kita amati karakternya. Elemen penelitian ini adalah seluruh penerima program kredit usaha, di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

## 2. Sampling Frame

Menurut Masri Singarimbun (1982: 2), *sampling frame* adalah daftar semua unsur-unsur sampling dalam populasi. Penelitian ini *sampling frame*-nya adalah daftar semua penerima program kredit usaha, di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, berjumlah 551 orang. Dapat dilihat pada tabel III. 1, berikut:

Tabel III. 1  
PENERIMA DANA BANTUAN PEMP TAHUN 2003

No	Penerima Program	KMP	Anggota
1	Pengolah ikan	4	31
2	Penangkapan/ Nelayan	55	467
3.	Pedagang campuran	7	53
	Jumlah	68	551

Sumber: Program PEMP Kelurahan Tanjung Mas Tahun 2003

## 3. Sampling size

Sampling adalah persentase besarnya sampel yang akan diambil. Bisa dinyatakan dalam prosentase dahulu, baru dihitung besar riilnya berapa. Pengambilan sampel sebanyak itu berdasarkan presisi yang dikehendaki dari penelitian. Salah satu rumus yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya sampel, yaitu rumus dari Lynch (Taufik, 1987) sebagai berikut:

$$n = \frac{NZ^2.p(1-p)}{Nd^2 + Z^2.p(1-p)}$$

n = sample size

N = population

Z = the value of the normal variable (1,96) for reability of 0,95

p = the largest possible propotion (0,95)

d = Sampling error

(0,025 condition 1)

(0,05 for condition 2)

(0,10 for condition 3)

Berdasarkan rumus tersebut, maka sampling size dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Diketahui jumlah populasi sebanyak 551 penerima kredit/ Kepala Keluarga (KK), dengan *sampling error* (*d*) yang digunakan adalah 10 persen dengan pertimbangan populasi yang cukup homogen dan aspek keterbatasan. Populasi yang relatif homogen dapat dilihat dari karakteristik sosial ekonomi responden yaitu masyarakat nelayan yang berpenghasilan berkategori rendah dan berpendidikan yang relatif tergolong rendah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jumlah sampel dari populasi penerima kredit/ KK adalah:

$$n = \frac{551 (1,96^2) 0,5 (1 - 0,5)}{551 (0,1)^2 + (1,96^2) 0,5 (1 - 0,5)}$$

$$n = \frac{551 (3,8416) 0,25}{551 (0,01) + (3,8416) 0,25}$$

$$n = \frac{551 (0,9604)}{551 (0,01) + 0,9604}$$

$$n = \frac{551 (0,9604)}{551 (0,01) + 0,9604}$$

$$n = \frac{529,1804}{6,4704}$$

$$n = 81,784805$$

Berdasarkan perhitungan dari rumus **LINCH** dengan *sampling error* 10 % diketahui jumlah responden penelitian 82 penerima program/ KK. Jadi Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka *sampling size* dalam penelitian ini berjumlah 82 responden penerima program/ KK

Tabel III. 2  
**SAMPLING SIZE**  
**PENERIMA DANA BANTUAN PEMP TAHUN 2003**

No	Penerima Program	KMP	Anggota	Pengitungan	Sampling
1	Pengolah ikan	4	31	31/ 551 X 82 %	4,613
2	Penangkapan/ Nelayan	55	467	467/ 551 X 82 %	69,499
3.	Pedagang campuran	7	53	53/ 551 X 82 %	7,887
	Jumlah	68	551		81,999

Dalam perhitungan dengan *sampling size* seperti yang tertera dalam tabel III. 2 diketahui jumlah responden sebanyak 82, 999 yang jika dibulatkan menjadi 82 responden/ KK.

## H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini meliputi:

### 1. Kuesioner

Yaitu teknik pengumpulan data dari responden dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan selanjutnya responden mengisi dengan menjawab pertanyaan dalam daftar pertanyaan yang tersedia tersebut.

### 2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui objek yang diteliti yang digunakan dalam rangka pengumpulan data untuk pembuatan proposal penelitian.

### 3. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung berbagai cara dengan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti yaitu melakukan pengamatan langsung pada obyek penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai implementasi program PEMP untuk pembuatan proposal penelitian.

### 4. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis (dokumen-dokumen) yang langsung berhubungan dengan objek penelitian (data sekunder).

## G. Teknik Analisis Data

Dalam menguji hipotesis, penelitian ini melakukan analisis pengaruh masing-masing variabel yang diuji dengan variabel dependen adalah implementasi program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) atau variabel (Y) dan variabel independen adalah tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program (X2). Sebelum melakukan analisis maka perlu lebih dilakukan proses editing data guna mendapatkan data yang tepat. Hasil jawaban responden tersebut kemudian dilakukan proses tabulasi. Tabulasi data tersebut dilakukan dengan merubah jawaban responden menjadi kuantitatif melalui penggunaan skala ordinal.

Selanjutnya untuk mengetahui korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi untuk menganalisis hubungan tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja aparat pelaksana program.

Analisa yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah korelasi *Rank Kendall* (RS) untuk korelasi tunggal, sedangkan untuk korelasi ganda (secara bersama-sama) menggunakan metode *Konkordasi Kendall*. Alasan yang mendasari penggunaan teknik analisa uji signifikansi dengan Korelasi *Rank Kendall* karena skala yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y menggunakan teknik Koefisien Determinan (KD). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teknik Korelasi Rank Kendall

Rumus ini digunakan untuk menguji hipotesis minor yaitu hubungan antara  $X_1$  dengan  $X_2$  dengan  $X_3$  dan dengan  $Y$ , adapun rumusnya sebagai berikut:

$$T = \frac{S}{\sqrt{1/2 N(N-1)}}$$

Keterangan :

$T$  = Koefisien korelasi Rank Kendall antara variabel  $x$  dan  $y$

$S$  = Jumlah observasi skor untuk semua pasangan

$N$  = Banyaknya obyek atau individu yang diurutkan pada  $x$  dan  $y$

Apabila terdapat banyak nilai yang sama pada observasi  $x$  dan  $y$  maka rumus yang digunakan adalah :

$$T = \frac{S}{\sqrt{1/2 N(N-1) - T_x 1/2 N(N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

$T_x$  = banyak observasi berangka sama dengan tiap kelompok angka sama pada variabel  $x$

$T_y$  = banyaknya observasi berangka sama dalam tiap kelompok angka sama pada variabel  $y$ .

Untuk uji signifikansi dengan menggunakan rumus  $Z$ -test karena  $N$  penelitian berjumlah lebih besar atau sama dengan dari 50 responden atau masuk kategori sampel penelitian besar, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{T}{\sqrt{\frac{2(2N+1)}{9N(N-1)}}}$$

Kemudian harga  $Z$  dikonsultasikan dengan tabel untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara variabel tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila  $Z_o \geq Z_t$  pada taraf signifikan 1 %, sangat signifikan, hipotesa diterima.
  - b. Apabila  $Z_o \leq Z_t$  pada taraf signifikan 5 %, berarti sangat signifikan, hipotesis diterima.
  - c. Apabila  $Z_o \geq Z_t$  pada taraf signifikan 5 %, berarti tidak signifikan, hipotesa ditolak
- b. Teknik Konkordasi Kendall

Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis mayor yang diajukan dalam penelitian. Rumusnya adalah:

$$W = \frac{S}{\sqrt{1/2 K^2 (N - N) - K \sum T}}$$

$T$  = faktor korelasi

$T$  = banyaknya observasi dalam satu kelompok yang memperoleh angka sama untuk ranking tertentu.

$\Sigma$  = mengarahkan menjumlahkan semua kelompok angka sama dalam masing-masing ranking.

Untuk menguji signifikansi Koefisien Konkordansi Kendall, perlu diadakan test dengan rumus :

$$X^2 = K (N - 1) W$$

Keterangan :

$X^2$  = Rest Chi Square

$W$  = Koefisien Konkordasi Kendall

Kemudian hasil perhitungan  $X^2$  tersebut dikonsultasikan terhadap harga Kritis Chi Square dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika  $X^2$  hitung  $\geq X^2$  1% maka sangat signifikan
  - b. Jika  $X^2$  hitung  $\leq X^2$ t maka hubungan signifikan
  - c. Jika  $X^2$  hitung  $\leq X^2$ t maka hubungan tersebut tidak signifikan
- c. Koefisien Determinan (KD)

Teknik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel X terhadap variabel Y dan seberapa besar pengaruh variabel X secara bersama-sama terhadap variabel Y. Rumusnya adalah:

$KD (XY) = (t_{XY})^2 \cdot 100 \%$

$KD (X1, X2 \text{ dan } Xn) = (W)^2 \cdot 100 \%$

Keterangan:

$KD$  = Koefisien Determinan

$t_{XY}^2$  = Koefisien Korelasi Rank Kendal

$W^2$  = Koefisien Konkordansi Kendal

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### A. 1. Keadaan Geografis

Kelurahan Tanjung Mas merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang utara dan dengan luas wilayahnya mencapai 323, 782 Ha, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Selatan : Kelurahan Purwodinatan
- Sebelah Timur : Kelurahan Kemijen
- Sebelah Barat : Kelurahan Bandarharjo

Wilayah Kelurahan Tanjung Mas terbagi menjadi 16 Rukun Warga (RW) dan 125 Rukun Tetangga (RT) dimana keadaan topografinya di Kelurahan Tanjung Mas adalah berada pada kisaran ketinggian 0, 50 m dari permukaan laut dengan temperatur rata-rata berkisar antara 26<sup>0</sup>C – 35<sup>0</sup>C.

##### A. 2. Keadaan Demografi

Berdasarkan data monografi Kelurahan Tanjung Mas tahun 2004 diketahui bahwa penduduk berjumlah 28887 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 13. 467 (46, 62%) dan penduduk perempuan berjumlah 15321 jiwa (53, 38%).

Tabel IV. 1  
SEBARAN PENDUDUK KELURAHAN TANJUNG MAS MENURUT  
KELOMPOK UMUR TAHUN 2004

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0 – 4	311	1, 08
2	5 – 9	596	2, 06
3	10 – 14	1163	4, 03
4	15 – 19	2298	7, 96
5	20 – 24	3434	11, 89
6	25 – 29	4277	14, 81
7	30 – 34	3167	10, 96
8	35 – 39	5444	18, 85
9	40 – 44	1791	6, 20
10	45 – 49	1664	5, 76
11	50 – 54	1453	5, 03
12	55 – 59	1256	4, 35
13	60 – 64	1093	3, 78
14	65 tahun ke atas	940	3, 25
	Jumlah	28887	100

Sumber : Monografi Kelurahan Tanjung Mas 2004

Ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar adalah kelompok umur 35-39 tahun yang berjumlah 5444 (18, 85 %) sedangkan penduduk kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah 311 (1, 08%) merupakan komposisi penduduk terkecil.

Dari keterangan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari komposisi umur penduduk sebagian besar berada pada masa usia menuju taraf kematangan sehingga implementasi program PEMP dimungkinkan akan dapat diterima dengan tanggapan positif dari pelaksana program maupun penerima program PEMP.

### A. 3. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian sebagai berikut :

Tabel IV. 2  
KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Nelayan	649	5,34
2	Pengusaha	13	0,11
3	Buruh	9377	77,23
4	Pedagang	473	3,89
5	Pengangkutan	269	2,22
6	Pegawai Negri Sipil	813	6,70
7	ABRI	162	1,33
8	Pensiunan	370	3,05
9	Peternak	15	0,12
	Jumlah	12141	100

Sumber : Monografi Kelurahan Tanjung Mas, 2004

Dari tabel di atas diketahui bahwa buruh merupakan jenis mata pencaharian yang ditekuni oleh sebagian besar penduduk Kelurahan Tanjung Mas (77,23 %) yang terdiri dari buruh industri (5220 orang), buruh bangunan (4157 orang). Sedangkan penduduk dengan persentase terkecil (0,11 %) adalah pengusaha.

Berdasarkan penduduk dilihat dari mata pencaharian program PEMpPsesuai dengan sarasanya ditunjukkan pada masyarakat nelayan baik pedagang maupun nelayan dan ini tentunya menggambarkan program PEMP hanya diberikan pada sebagian kecil dari seluruh masyarakat dan sebagian besar masyarakat nelayan dan pedagang hasil para nelayan. Keadaan ini tentunya menggambarkan secara kuantitas program menjangkau sasaran.

Tabel IV. 3  
SARANA PENDIDIKAN DI KELURAHAN TANJUNG MAS

NO.	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	6	40
2	SD / MI	7	46,67
3	SMP / MTs	1	4,67
4	SMU / MA / SMK	1	4,67
5	Akademi / Perguruan Tinggi	-	-
	Jumlah	15	100

Sumber : Monografi Kelurahan Tanjung Mas, 2004

Sarana pendidikan yang tersedia di Kelurahan Tanjung Mas berjumlah 15 buah dimana mulai tingkat pra sekolah hingga perguruan tinggi yang tidak tersedia sarananya yaitu akademi/ perguruan tinggi. Dari jumlah itu sebagian besar adalah sarana pendidikan tingkat dasar (SD/ MI) yaitu 7 buah (46,67%), sedangkan Tanaam Kanak-Kanak (TK) tersedia 6 sarana (40%) dan sisanya dibagi SMP dan SMU masing-masing 1 sarana (6,67%).

Tabel IV. 4  
SARANA EKONOMI DI KELURAHAN TANJUNG MAS

NO.	Sarana Ekonomi	Jumlah	Persentase
1	Koperasi	6	2,71
2	Pasar	14	6,33
3	Toko / Warung	98	44,34
4	Bank	2	0,90
5	Industri	97	43,89
6	Stasiun Kapal Laut	1	0,45
7	Stasiun Kereta Api	1	0,45
8	Hotel/ Losmen	2	0,90
	Jumlah	221	100

Sumber : Monografi Kelurahan Tanjung Mas, 2004

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana ekonomi di Kelurahan Tanjung Mas sebagian besar berupa toko/ warung sebanyak 98 buah (44, 34%) dan industri (besar, menengah, kecil dan rumah tangga) sebanyak 97 buah (43, 89%).

## **B. Penyajian Data**

Dalam bab ini akan dideskripsikan data-data berdasarkan hasil yang diperoleh melalui daftar pertanyaan yang telah diajukan kepada responden. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 82 orang dan keterangan yang dihimpun dari mereka dipergunakan dalam analisa data dan pengujian hipotesis.

Data yang akan diuji meliputi identitas responden, variabel implementasi program (Y), tingkat komunikasi (X1), kemampuan pelaksana program (X2) dan sikap pelaksana program (X3). Semua data itu akan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan tabel silang guna memberi gambaran secara menyeluruh tentang fenomena yang diamati dan ditemukan di lapangan. Disamping itu juga untuk memberikan gambaran dasar pengujian hipotesis penelitian.

Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang meliputi data mengenai identitas responden, implementasi program (Y), tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program (X3).

### B. 1. Identitas Responden

Digunakan untuk mengetahui karakteristik objek yang akan diteliti. Identitas responden dibagi menurut umur dan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan kategori program. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV. 5  
RESPONDEN MENURUT UMUR

Umur (tahun)	Frekuensi	Persentase
20 – 30	12	14, 63
31 – 40	43	52, 44
41 ke atas	27	32, 93
Jumlah	82	100

Sumber : Data primer yang diolah dari identitas responden

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden 43 (52, 44 %) berusia antara 31- 40 tahun. Oleh karena itu dapatlah dipahami bahwa sebagian besar responden merupakan kelompok usia produktif dan menuju pada usia kematangan dalam bekerja sehingga dilihat dari sisi usia responden mempunyai kecenderungan untuk dapat memanfaatkan program PEMP secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tabel IV. 6  
RESPONDEN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	39	47,57
Tamat SD	24	29,27
Tamat SMP	12	14,63
Tamat SMA	7	8,54
Jumlah	82	100

Sumber : Data primer yang diolah dari identitas responden

Dari tabel di atas dapat dikemukakan bahwa sebagian besar responden adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD sebanyak 39 orang (47,57%), lainnya tamat SD 24 (29,27%), tamat SMP 12 (14,63%) dan tamat SMA sebanyak 7 orang atau 8,54%.

Oleh karena itu, dilihat dari tingkat pendidikan responden yang sebagian besar tidak sekolah/ tidak tamat SD maka ada kemungkinan proses terhambatnya implementasi karena kemungkinan penerima program kurang bisa menerima pesan-pesan program secara baik dalam implementasi program PEMP.

Tabel IV. 7  
RESPONDEN MENURUT JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	57	69,51
Perempuan	25	32,93
Jumlah	82	100

Sumber : Data primer yang diolah dari identitas responden

Tabel di atas menunjukkan sebagian besar responden adalah laki-laki 57 (69, 51%). Jadi dengan demikian ada kemungkinan adanya kondisi dukungan penerima program karena laki-laknya biasanya lebih rasional dari pada perempuan.

Tabel IV. 8  
RESPONDEN MENURUT KATEGORI PROGRAM

Responden	Frekuensi	Persentase
1. Nelayan	69	84, 15
2. Pengolah Ikan	5	6, 10
3. Pedagang campuran	8	9, 76
Jumlah	82	100

Sumber : Data primer yang diolah dari identitas responden

Dari tabel IV. 8 mengenai responden menurut kategori program sebagian besar (84, 15 %) adalah nelayan. Hal ini berarti sesuai dengan rencananya bahwa program PEMP diperuntukan untuk masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

## B. 2. Implementasi program (X1)

Implementasi program merupakan pelaksanaan kebijakan oleh pelaksana program untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh program tersebut seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Disini akan disajikan data dari masing-masing indikator implementasi program dari hasil jawaban pengisian kuesioner.

Tabel IV.9  
TINGKAT PENGETAHUAN PENERIMA PROGRAM PEMP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tahu	82	100
Tidak tahu	-	-
Jumlah	82	100

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 1

Dari tabel IV. 9 tersebut dapat dikemukakan bahwa dilihat dari tingkat pengetahuan penerima program PEMP sebesar PEMP 100 % penerima program tahu mengenai adanya program PEMP yang dilakanakan di Kelurahan Tanjung Mas. Jadi dengan demikian bahwa seluruh responden mengetahui adanya program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas.

Tabel IV. 10  
SUMBER INFORMASI PENERIMA PROGRAM PEMP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tokoh masyarakat	12	14, 63
Pelaksana program	40	48, 78
RT/ RW	13	15, 85
Aparat pelaksana	11	13, 41
Lainya	6	7, 31
Jumlah	82	100

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 2

Dari tabel IV. 10 tersebut dapat dikemukakan dilihat dari sumber informasi yang diperoleh penerima program PEMP dari 82 responden sebagian besar 48, 78 % berasal dari pelaksana program.

Tabel IV. 11  
BESARNYA NILAI BANTUAN PROGRAM PEMP

Nilai Bantuan	Frekuensi	Persentase
Rp. 500. 000	69	84, 15
Rp. 1. 125. 000	5	6, 10
Rp. 850. 000	8	9, 76
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.3

Dari tabel IV. 11 tersebut dapat dikemukakan bahwa besarnya nilai bantuan yang diterima oleh penerima program dari 82 responden sebagian besar 84, 15% berjumlah Rp. 500. 000, 00.

Tabel IV. 12  
BESARNYA NILAI BANTUAN PROGRAM PEMP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	8	9,8
Cukup sesuai	21	25, 6
Kurang sesuai	47	57, 3
Tidak sesuai	6	9, 8
Jumlah	82	100

Sumber: Diolah dari pertanyaan no. 4

Dari tabel IV.12 diketahui dilihat dari besarnya nilai bantuan yang diterima oleh penerima program dari 82 responden sebagian besar 57, 3% responden menjawab kurang sesuai.

Tabel.IV. 13  
TINGKAT KELANCARAN IMPLEMENTASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Lancar	8	9,8
Cukup lancar	21	25,6
Kurang lancar	47	57,3
Tidak lancar	6	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.05

Dari tabel IV.13 diketahui dilihat dari tingkat lancarnya implementasi program PEMP di lapangan dari 82 responden sebagian besar 57,3% responden menjawab program PEMP yang dilaksanakan kurang lancar.

Tidak lancarnya implementasi program PEMP tersebut di lapangan menurut responden terlihat dari adanya kondisi pelaksana program yang kurang intensifnya sosialisasi program kepada calon penerima program yang tidak secara menyeluruh diberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program. Memang diakui oleh penerima program bahwa ada program PEMP di Kelurahan akan tetapi informasi yang diperoleh tidak menyeluruh menyangkut tujuan program dan bagaimana cara pelaksanaannya.

Tabel IV.14  
TINGKAT KEMUDAHAN PERSYARATAN KREDIT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mudah	6	7,3
Cukup mudah	26	31,7
Kurang mudah	41	50
Tidak mudah	9	11
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.6

Dari tabel IV.14 diketahui dilihat dari tingkat kemudahan dalam memenuhi persyaratan kredit dari 82 responden bahwa sebagian besar responden 50% menjawab kurang mudah.

Kurang mudahnya dalam pemenuhan syarat kredit yang telah ditentukan tersebut menurut sebagian besar responden terlihat dari adanya persyaratan untuk mendapatkan kredit dengan menggunakan jaminan atas pinjaman yang didapatkan sehingga mereka harus mencari ataupun mengurus jaminan apa yang sekiranya tepat untuk jaminan dalam mendapatkan bantuan program PEMP.

Tabel IV. 15  
TINGKAT KETERLIBATAN DALAM PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Dilibatkan	8	9,8
Cukup Dilibatkan	28	34,1
Kurang dilibatkan	38	46,3
Tidak dilibatkan	8	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.7

Dari tabel IV.15 diketahui dilihat dari tingkat keterlibatan penerima program dalam implementasi program PEMP dari 82 responden bahwa sebagian besar 46,3% responden menjawab kurang dilibatkannya.

Kurang dilibatkannya mereka terlihat dari alasan yang dikemukakan sebagian besar responden yang menyatakan mereka kurang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas penentuan pihak-pihak yang mendapat bantuan program, penentuan dalam besarnya pinjaman bantuan program dan persyaratan-persyaratan dalam menadapatkan bantuan program. Dalam

peretemuan tersebut yang dilibatkan adalah para tokoh masyarakat dan para ketua RT/ RW saja.

Tabel IV. 16  
TINGKAT KEMANFAATAN PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Bermanfaat	4	4, 9
Cukup bermanfaat	29	35, 4
Kurang bermanfaat	39	47, 6
Tidak bermanfaat	10	12, 2
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.8

Dari tabel IV. 16 diketahui dilihat dari tingkat kemanfaatan program PEMP dari 82 responden bahwa sebagian besar 47, 6 % responden menjawab program kurang bermanfaat.

Kurang bermanfaatnya program PEMP tersebut terlihat dari alasan yang dikemukakan sebagian besar responden yang menyatakan bahwa program PEMP dilihat dari jumlah nominalnya hanya sedikit membantu mengurangi kesulitan modal usaha penerima program seperti untuk nelayan hanya sebatas untuk bisa membeli sebagian besar jaring dan memperbaiki kapalnya dan apabila kondisinya sedang pailit bantuan program tersebut sebagian digunakan untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian bagi para pedagang ikan bantuan tersebut sebatas untuk sedikit menambah modal usahanya dimana mereka tetap saja dengan tambahan modal yang sedikit masih kalah bersaing dengan para pedagang yang mempunyai modal lebih banyak, demikian juga dengan para pengolah ikan kemanfaatannya hanya sebatas dapat menambah sedikit volume pembelian ikan nelayan untuk mengolah hasil tangkapan

nelayan karena itu mereka tetap saja kalah bersaing dengan pengolah ikan yang sudah mapan dengan modal yang besar.

Tabel IV.17  
TINGKAT KEMAMPUAN BADAN PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	9	11
Cukup baik	28	34,1
Kurang baik	40	48,8
Tidak baik	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.9

Dari tabel IV.17 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan badan pelaksana program PEMP dari 82 responden sebagian besar 48,8 % responden menjawab kurang baik.

Kurang baiknya tingkat kemampuan badan pelaksana program PEMP terlihat dari alasan sebagian besar responden yang mengatakan bahwa dalam menyelenggarakan jasa-jasa kredit PEMP orang-orang yang mengurus masalah tersebut hanya beberapa orang saja dengan sehingga mereka kewalahan dalam melakukan tindakan mengaudit syarat-syarat kredit PEMP, melakukan pembagian kredit PEMP dan mengurus angsuran sehingga para calon penerima kredit menunggu proses pelayanan yang lama.

Tabel IV.18  
TINGKAT PEMENUHAN ANGSURAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memenuhi	9	11
Cukup memenuhi	29	35,4
Kurang memenuhi	39	47,6
Tidak memenuhi	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.10

Dari tabel IV.18 diketahui dilihat dari tingkat penerima program PEMP dalam memenuhi angsuran kredit bahwa dari 82 responden sebagian besar 47, 6 % responden menjawab kurang memenuhi kewajiban.

Alasan yang mendasarinya dari sebagian besar responden tersebut adalah bahwa mereka menganggap tahunya program tersebut hibah dari informasi yang didapatkan sehingga mereka beranggapan jika tidak mengembalikan angsuranpun tidak mendapat sanksi apa-apa, sebagai bukti walaupun tidak mengembalikan sebagian angsuran yang harus dibayar mereka hanya dikasih tahu ketua kelompoknya saja untuk segera membayar tanpa adanya sanksi pencabutan terhadap jaminan yang diberikan. Kemudian alasan lainnya adalah bahwa mereka tidak memenuhi angsuran karena adanya kondisi penghasilan yang sifatnya musiman, sehingga jika terjadi musim paceklik tidak sanggup untuk mengangsur.

Tabel IV.19  
TINGKAT PENAMBAHAN MODAL

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengurangi	7	8,5
Cukup mengurangi	26	31,7
Kurang mengurangi	45	54,6
Tidak mengurangi	4	4,9
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.11

Dari tabel IV.19 diketahui dilihat dari penambahan modal usaha bagi penerima program bahwa dari 82 responden sebagian besar 54, 6 % responden menjawab program kurang mengurangi kesulitan modal yang mereka.

Alasan sebagian besar responden tersebut atas jawaban di atas adalah bahwa bantuan yang mereka terima mengingat untuk biaya hidup sehari-hari

kurang maka sebagian dari pinjaman digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari sehingga hanya sedikit pinjaman saja yang dapat dijadikan tambahan modal usahanya.

Tabel IV. 20  
TINGKAT KENAIKAN PENDAPATAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Meningkatkan	9	10,97
Cukup meningkatkan	23	28,06
Kurang meningkatkan	41	50
Tidak meningkatkan	9	10,97
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.12

Dari Tabel IV.20 diketahui dilihat dari tingkat kenaikan pendapatan dari adanya bantuan program PEMP bahwa dari 82 responden sebagian besar 50 % responden menjawab bahwa program kurang meningkatkan pendapatan mereka.

Alasan dari sebagian besar responden tersebut adalah tambahan modal yang mereka dapatkan tersebut kurang membantu peningkatan pendapatan karena besarnya bantuan kurang besar hanya sedikit menambah modal usahanya sehingga hanya sedikit berpengaruh pada volume hasil tangkapannya, sedikit menambah keuntungannya pedagang dan pengolah ikan.

Tabel IV.21  
MAMPU MENGATASI PERSOLAN EKONOMI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Mengatasi	5	6,1
Cukup mengatasi	20	24,39
Kurang mengatasi	50	60,1
Tidak mengatasi	7	8,51
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.13

Dari tabel IV.21 diketahui dari tingkat program PEMP mampu mengatasi persoalan ekonomi penerima program bahwa dari 82 responden sebagian besar 60,1 % responden menjawab bahwa program kurang dapat mengatasi persoalan ekonomi mereka.

Alasan sebagian responden yang mendasarinya adalah bahwa program PEMP yang mereka terima hanya sedikit saja menambah modal usahanya sehingga tingkat pendapatanyapun hanya naik sedikit saja. Dimana dari sisi para nelayan hanya sedikit menambah volume hasil tangkapannya dan dari sisi pedagang ikan serta pengolah ikan hanya sedikit menambah keuntungan usahanya.

Tabel IV.22  
TINGKAT KESADARAN PENERIMA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Menimbulkan	10	12,5
Cukup menimbulkan	27	32,9
Kurang menimbulkan	31	37,8
Tidak menimbulkan	14	17,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.14

Dari tabel IV.22 diketahui dilihat dari tingkat kesadaran penerima program tentang arti pentingnya program PEMP bahwa dari 82 responden sebagian besar 37,8 % responden menjawab kurang menimbulkan kesadaran tentang arti pentingnya program pembangunan.

Alasan sebagian besar penerinma program PEMP, adalah bahwa mereka beranggapan sebagai warga kurang mampu selayaknya dibantu dan bila perlu tidak,usah mengangsur. Apabila mereka mengangsurpun maka pihak pemberi program harus bisa mengerti keadaanya, artinya jika tidak kuat

mengangsur menganggap keadaan tersebut hal yang biasa. Mereka merasa ingin dilibatkan dan berpartisipasi dalam program tersebut tetapi tentunya juga bilamana kondisi kebutuhannya sudah cukup terpenuhi.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel implementasi kebijakan maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 33-21 = 12/4 = 3$  maka  $i = 3$ . Pengelompokan skor tabel untuk variabel implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.23  
KLASIFIKASI SKOR  
VARIABEL IMPLEMENTASI PROGRAM

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	21-23
Kurang Tinggi	KT	24-26
Cukup Tinggi	CT	27-29
Tinggi	T	30-33

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun rekapitulasi variabel implementasi program. Berdasarkan data yang disajikan tersebut dapat diketahui hasil rekapitulasi penilaian, sebagai berikut :

Tabel IV.24  
REKAPITULASI PENILAIAN  
VARIABEL IMPLEMENTASI PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	16	19, 51
KurangTinggi (KT)	40	48, 78
Cukup Tinggi( CT)	24	29, 26
Tinggi (T)	2	2, 43
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 4-14

Dari tabel IV. 24 tentang rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa implementasi program PEMP masih kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dari nilai skor dalam kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi sebanyak 40 (48, 78%).

### B. 3. Tingkat Komunikasi (X1)

Dalam kaitannya dengan suatu pelaksanaan suatu program, peranan komunikasi sangat penting dan dibutuhkan, hal ini mengandung bahwa dengan komunikasi yang baik maka akan terciptanya persamaan persepsi dan pandangan dari pelaksana tentang arti, tujuan dan sasaran dari implementasi kebijakan tersebut sehingga tujuan kebijakan yang direncanakan akan tercapai. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator komunikasi hasil jawaban pengisian kuesioner.

Tabel IV.25  
TINGKAT PENGUASAAN INFORMASI  
PELAKSANA PROGRAM PEMP

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Menguasai	5	6,1
Cukup menguasai	26	31,7
Kurang menguasai	44	53,7
Tidak menguasai	7	8,5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.15

Dari tabel IV.25 diketahui dilihat dari penguasaan informasi yang diterima penerima program bahwa dari 82 responden sebagian besar responden 53,7 % responden menjawab pelaksana program kurang menguasai informasi tentang program PEMP.

Alasan sebagian besar responden adalah bahwa pelaksana program PEMP pada saat program dilaksanakan jarang dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan yang membahas masalah program PEMP, pelibatan pelaksana program PEMP di lapangan yang merupakan koordinator kelompok hanya sekedar mengkoordinir anggotanya memberitahukan adanya bantuan program

PEMP kepada anggotanya dan kewajiban mengangsur. Kemudian pada saat proses pemberian informasi mengenai masalah program PEMP oleh pelaksana inti program PEMP mereka kurang bisa menerima informasi kebijakan secara menyeluruh karena tingkat penerimaan mereka yang kurang maksimal yang disebabkan tingkat pendidikannya yang rata-rata masih rendah.

Tabel IV.26  
TINGKAT PEMAHAMAN PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Paham	5	6,1
Cukup paham	27	32,9
Kurang paham	38	46,3
Tidak paham	12	14,6
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.16

Dari tabel IV.26 diketahui dilihat dari tingkat pemahaman pelaksana program terhadap implementasi program PEMP bahwa dari 82 responden sebagian besar 46,3 % responden menjawab pelaksana program kurang paham tentang implementasi program.

Alasan dari sebagian besar penerima program PEMP dari jawaban tersebut adalah bahwa pelaksana program PEMP kurang bisa menerima transfer informasi tentang implementasi program dilapangan karena tingkat pendidikannya yang rendah. Kemudian alasan lainnya adalah bahwa dalam implementasi program PEMP mereka hanya bertugas mengkoordinasikan pemberitahuan siapa yang menjadi penerima program dan menjadi anggota kelompoknya serta mengkoordinasikan tindakan pengangsuran bantuan kredit.

Tabel IV. 27  
TINGKAT KEJELASAN INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Jelas	7	8,5
Cukup jelas	25	30,5
Kurang jelas	42	51,2
Tidak jelas	8	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.17

Dari tabel IV. 27 diketahui dilihat dari tingkat kejelasan informasi tentang program PEMP yang diterima oleh penerima program bahwa dari 82 responden, sebagian besar 51,2% responden menjawab mereka kurang jelas dalam penerimaan informasi tentang program yang disampaikan pelaksana program.

Alasan dari sebagian responden atas jawabanya tersebut adalah bahwa para pelaksana program kurang bisa menyampaikan informasi tentang program PEMP secara baik hal ini terjadi karena para pelaksana program sebagian besar pendidikanya rendah.

Tabel IV. 28  
TINGKAT KEMUDAHAN BAHASA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sederhana	5	6,1
Cukup sederhana	25	30,5
Kurang sederhana	42	51,2
Tidak sederhana	5	12,2
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.18

Dari tabel IV. 28 diketahui dilihat dari tingkat kemudahan bahasa yang digunakan pelaksana program dalam penyampaian informasi program PEMP bahwa dari 82 responden, sebagian besar 51,2% responden menjawab bahasa

yang digunakan pelaksana dalam penyampaian informasi program PEMP kurang sederhana.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah dalam penyampaian informasi program PEMP bahasa yang digunakan menggunakan bahasa campuran antara Jawa dan Indonsia sehingga penerima kurang bisa mengerti dan paham atas informasi tentang program PEMP yang mereka terima dari pelaksana program.

Tabel IV.29  
TINGKAT RINCINYA INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Terperinci	5	6,1
Cukup terperinci	29	35,4
Kurang terperinci	42	51,2
Tidak terperinci	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.19

Dari tabel IV. 29 diketahui dilihat dari tingkat rincinya informasi yang diterima penerima program PEMP bahwa dari 82 responden, sebagian besar 51,2 % responden menjawab informasi yang disampaikan pelaksana program kurang terperinci.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah bahwa pelaksana program tidak secara baik menguasai informasi tentang program PEMP karena informasi yang diterima hanya sebagian saja sehingga tidak bisa secara rinci dalam menyampaikan informasi tentang program PEMP kepada penerima program.

Tabel IV. 30  
TINGKAT LENGKAPNYA INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Lengkap	3	3,7
Cukup lengkap	28	34,1
Kurang lengkap	45	54,9
Tidak lengkap	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.20

Dari tabel IV. 30 diketahui dilihat dari tingkat lengkapnya informasi tentang program PEMP yang diterima penerima program bahwa dari 82 responden, sebagian besar 54,9 % responden menjawab informasi yang diterima kurang lengkap.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah bahwa pelaksana program hanya menerima sebagian kecil saja informasi tentang program PEMP yang dianggap mengerti sehingga informasi tentang program PEMP tidak secara lengkap diterima penerima program.

Tabel IV. 31  
TINGKAT MEMADAINYA INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memadai	4	4,9
Cukup memadai	29	35,4
Kurang memadai	45	54,9
Tidak memadai	4	4,9
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.21

Dari tabel IV. 31 diketahui dilihat dari tingkat memadainya informasi tentang program PEMP yang diterima penerima program bahwa dari 82 responden, sebagian besar 54,9 % responden menjawab informasi yang diterima kurang memadai.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah bahwa para pelaksana program tidak secara baik mengerti dan paham atas informasi tentang program PEMP dari pengurus program PEMP karena tingkat pendidikanya sebagian besar masih rendah sehingga informasi yang diterima kurang bisa memadai.

Tabel IV. 32  
TINGKAT PENGGUNAAN MEDIA  
MEMPERJELAS INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Memperjelas	9	11
Cukup memperjelas	27	32,9
Kurang memperjelas	38	46,3
Tidak memperjelas	8	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.22

Dari tabel IV. 32 diketahui dilihat dari tingkat penggunaan media dalam penyampaian informasi tentang program PEMP dalam memperjelas informasi yang diterima oleh penerima program bahwa dari 82 responden, sebagian besar 46,3 % responden menjawab kurang memperjelas informasi yang diterima penerima program.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah dalam menyampaikan informasi tentang program PEMP pelaksana program menggunakan media catatan kecil yang dititipkan kepada penerima program ketika anggotanya tidak ada sehingga media tersebut kurang efektif dalam membantu memperjelas pesan program PEMP.

Tabel IV. 33  
TINGKAT SESUAINYA INFORMASI TENTANG PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	3	3,7
Cukup sesuai	23	28
Kurang sesuai	51	62,2
Tidak sesuai	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.23

Dari tabel IV.33 diketahui dilihat dari tingkat kesesuaian informasi tentang program PEMP yang diterima pelaksana program dari penerima program bahwa dari 82 responden sebagian besar 62,2 % responden menjawab kurang sesuai.

Alasan sebagian responden atas jawaban tersebut adalah pelaksana program tidak secara baik dalam mentransfer informasi kebijakan sehingga ketika disampaikan kepada pelaksana program informasinya terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam program.

Tabel IV.34  
TINGKAT KESESUAIAN MEDIA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tepat	5	6,1
Cukup tepat	31	37,8
Kurang tepat	40	48,8
Tidak tepat	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.24

Dari tabel IV.34 diketahui dilihat dari kesesuaian media yang digunakan dalam komunikasi program dari 82 responden sebagian besar 48,8 % responden menjawab kurang tepat.

Tabel IV.35  
FREKUENSI KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rutin	6	7,3
Cukup rutin	29	35,4
Kurang rutin	38	46,3
Tidak rutin	9	11
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.25

Dari tabel IV.35 diketahui dari frekuensi komunikasi dalam implementasi program PEMP sebagian besar 46,3 % responden menjawab kurang rutin.

Alasan sebagian besar responden atas jawabannya adalah para pelaksana program PEMP melakukan proses komunikasi ketika memang diperlukan saja dan kemudian mereka melakukan komunikasi bila diperingatkan oleh pengelola program untuk memberi informasi kepada anggota kelompoknya.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan tingkat komunikasi maka akan digunakan rumus sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 35-24 = 11/4 = 2,75$  , karena pecahan maka dibulatkan keatas menjadi 3 maka  $i = 3$ . Pengelompokan skor variabel tingkat komunikasi adalah sebagai berikut :

Tabel IV.36  
**KLASIFIKASI SKOR**  
**VARIABEL TINGKAT KOMUNIKASI**

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	24-26
Kurang Tinggi	KT	27-29
Cukup Tinggi	CT	30-32
Tinggi	T	33-35

Berdasarkan klasifikasi penilaian dapat disusun rekapitulasi variabel komunikasi. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.37  
**REKAPITULASI PENILAIAN**  
**VARIABEL TINGKAT KOMUNIKASI**

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	18	21,95
KurangTinggi (KT)	37	45,12
Cukup Tinggi( CT)	21	25,61
Tinggi (T)	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 15-26

Dari Tabel rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa tingkat komunikasi yang dilakukan oleh petugas dalam menyampaikan pesan tentang program PEMP mempunyai tingkat komunikasi yang kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dengan dari nilai skor variabel tingkat komunikasi sebagian besar kurang tinggi 37 (45,12 %).

#### B. 4. Kemampuan kerja pelaksana program (X2)

Kemampuan kerja pelaksana program merupakan sebuah kata yang biasanya menunjukkan profesionalisme seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam kapasitasnya sebagai pelaksana program. Kemampuan kerja berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental seseorang yaitu menunjuk apa yang dapat dikerjakan bukan apa yang telah dikerjakan. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator kemampuan kerja pelaksana program dari hasil jawaban pengisian kuesioner.

Tabel IV.38  
TINGKAT KEMAMPUAN MENGERJAKAN  
PROSES PERSYARATAN KREDIT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	8	9,8
Cukup baik	29	35,4
Kurang baik	36	46,3
Tidak baik	9	11
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.26

Dari tabel IV. 38 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam mengerjakan proses persyaratan kredit dari 82 responden bahwa sebagian besar 46,3 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian responden atas jawabanya tersebut adalah bahwa para pelaksana program PEMP kurang menguasai masalah penghitungan, verifikasi persyaratan dan pembukuan keuangan sehingga proses persyaratan kredit berlangsung lama.

Tabel IV.39  
TINGKAT KEMAMPUAN MENERIMA INFORMASI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	4	4,9
Cukup baik	30	36,6
Kurang baik	42	51,2
Tidak baik	6	4,9
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.27

Dari tabel IV.39 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan dalam menerima informasi dari penerima program dari 82 responden bahwa sebagian besar responden 51,2 % menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawaban tersebut adalah tingkat penyampaian informasi yang disampaikan penerima program kurang baik hal ini dikarenakan karena tingkat pendidikanya rata-rata masih rendah.

Tabel IV.40  
TINGKAT KEMAMPUAN MENJALIN SILATURAHMI

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	5	6,1
Cukup baik	28	34,1
Kurang baik	44	53,7
Tidak baik	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.28

Dari tabel IV. 40 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam menjalin hubungan silaturahmi dengan penerima program dari 82 responden sebagian besar 53,7 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar atas jawabanya tersebut adalah mengingat karakteristik masyarakat pantai yang keras sehingga mereka cenderung

berbicara secara saklek dalam artian cenderung tidak bisa mengambil hati penerima program dan adaptasinya kurang.

Tabel IV.41  
TINGKAT KEMAMPUAN MENJALIN KERJA SAMA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	5	6,1
Cukup baik	25	30,5
Kurang baik	44	53,7
Tidak baik	8	8,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.29

Dari tabel IV. 41 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam menjalin kerjasama dengan penerima program dari 82 responden sebagian besar 53,7 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian responden atas jawabanya tersebut adalah mereka hanya bertugas mengurus kredit, menarik angsuran dan mengkoordinatori kelompoknya dan melupakan pentingnya kerjasama dengan penerima program.

Tabel IV.42  
TINGKAT KEMAMPUAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	3	3,7
Cukup baik	26	31,7
Kurang baik	46	56,1
Tidak baik	7	8,5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.30

Dari tabel IV.42 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam penyelesaian konflik oleh antar penerima program dari 82 responden sebagian besar responden 56,1 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabannya tersebut adalah jika terjadi konflik, para pelaksana program mengalami kesulitan dalam menanganai konflik dari mana sebab masalahnya, menganalisis sumber konflik dan menacari solusinya sehingga mereka mengalami kesulitan harus bagaimana menyelesaikanya.

Tabel IV.43  
TINGKAT KEMAMPUAN MENCIPTAKAN KESADARAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	7	8,5
Cukup baik	26	31,7
Kurang baik	39	47,6
Tidak baik	10	12,2
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.31

Dari tabel IV. 43 diketahui bahwa dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam menciptakan kesadaran kepada penerima program dari 82 responden sebagian besar 47,6 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabannya tersebut adalah mereka kesulitan untuk memulai dari mana dan bagaimana dalam membangun kesadaran penerima program mengenai pentingnya program pembangunan.

Tabel IV. 44  
TINGKAT KEMAMPUAN MENERIMA KELUHAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	6	7,3
Cukup baik	20	34,4
Kurang baik	48	58,5
Tidak baik	8	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.32

Dari tabel IV. 44 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam menerima keluhan penerima program dari 82 responden sebagian besar 58,5 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah tingkat empati dan kemauan untuk mendengarkan secara seksama dan sabar dalam menerima keluhan penerima program masih kurang.

Tabel IV. 45  
TINGKAT KEMAMPUAN MEMBERIKAN IDE-IDE PEMBAHARUAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	5	6,1
Cukup baik	26	31,7
Kurang baik	43	52,4
Tidak baik	7	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.33

Dari tabel IV. 45 diketahui dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam pemberian ide-ide pembaharuan untuk memperbaiki implementasi program PEMP dari 82 responden sebagian besar 52,4 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah mengingat pengetahuan terhadap program PEMP dan pengetahuan tentang implementasi program PEMP saja masih kurang baik apalagi berusaha menyampaikan ide-ide pembaharuan bagi perbaikan implementasi kebijakan.

Tabel IV.46  
TINGKAT KEMAMPUN MERUMUSKAN SOLUSI PERMASALAHAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	6	7,3
Cukup baik	30	36,6
Kurang baik	39	47,6
Tidak baik	7	8,5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.34

Dari tabel IV.46 diketahui dilihat dari tingkat kemampun pelaksana program dalam merumuskan solusi permasalahan yang dihadapi penerima program dari 82 responden sebagian besar 47,6 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah mereka tidak mempunyai metode yang tepat mengenai bagaimana menyelesaikan masalah yang dihadapi para penerima program sehingga terhadap masalah tersebut cenderung berusaha membantu penyelesaiannya sekedar memberi solusi yang dianggap baik bagi mereka.

Tabel IV.47  
TINGKAT KEMAMPUAN MEMBERIKAN  
PEMAHAMAN PROSEDUR IMPLEMENTASI PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	8	9,8
Cukup baik	29	35,4
Kurang baik	39	47,5
Tidak baik	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.35

Dari Tabel IV. 47 diketahui bahwa dilihat dari tingkat kemampuan pelaksana program dalam memberikan pemahaman terhadap prosedur

implementasi program PEMP dari 82 responden se bagian besar 47, 6 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah sebagai akaibat pemahaman mereka yang kurang baik terhadap program dan proses implementasi program PEMP menyebabkan kemampuan mereka dalam membe rikan pemahaman prosedur implementasi program PEMP kurang baik juga.

Tabel IV.48  
TINGKAT KEMAMPUAN PENGARSIPAN KERTAS KERJA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Baik	6	7, 3
Cukup baik	24	29, 3
Kurang baik	45	54, 9
Tidak baik	7	8, 5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.36

Dari tabel IV.48 diketahui dilihat dari tingkat kemampua pelaksana program dalam pengarsipan kertas kerja dari 82 responden sebagian besar 54, 9 % responden menjawab kurang baik.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah para pelaksana program tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan masalah kearsipan/ keadministrasian sehingga mereka mengalami kesulitan dalam melakukan kertas kerja implementasi program PEMP.

Untuk mengelompokkan nilai-nilai total hasil penjumlahan dari jawaban kuesioner yang berkaitan dengan variabel kemampuan pelaksana program maka akan digunakan rumus sebagai berikut:

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 34-19 = 15/4 = 3,75$  maka  $i = 4$ .

Pengelompokan skor tabel untuk variabel kemampuan aparat adalah sebagai berikut :

Tabel IV.49  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	19-22
Kurang Tinggi	KT	23-26
Cukup Tinggi	CT	27-30
Tinggi	T	31-34

Berdasarkan tabel di atas dapat disusun rekapitulasi penilaian variabel kemampuan kerja pelaksana program. Hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.50  
REKAPITULASI PENILAIAN  
VARIABEL KEMAMPUAN KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	6	7,3
KurangTinggi (KT)	44	53,66
Cukup Tinggi( CT)	27	32,93
Tinggi (T)	5	6,09
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no. 27-37

Dari tabel IV.50 tentang rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa kemampuan yang dimiliki pelaksana program dalam melaksanakan program PEMP masih kurang baik hal ini ditunjukkan dari nilai skor variabel kemampuan kerja pelaksana program yang sebagian besar 53, 66 % kurang tinggi.

#### B. 5. Sikap pelaksana program (X3)

Sikap aparat merupakan sebuah kata yang biasanya menunjukkan tingkah laku seseorang untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan. Sikap kerja berhubungan erat dengan sifat fisik dan mental seseorang yaitu menunjuk apa yang dapat dikerjakan bukan apa yang telah dikerjakan. Di bawah ini akan disajikan data dari masing-masing indikator kemampuan kerja pelaksana program dari hasil jawaban pengisian kuesioner.

Tabel IV. 51  
TINGKAT KESESUAIAN MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN  
KEINGINAN PRIBADINYA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	4	4,9
Cukup sesuai	24	29,3
Kurang sesuai	47	57,3
Tidak sesuai	7	48,5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.37

Dari tabel IV.51 diketahui dilihat dari tingkat kesesuaian pelaksana program melaksanakan tugasnya sesuai dengan keinginan pribadinya dari 82 responden sebagian besar 57,3 % responden menjawab kurang sesuai.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah mengingat menjadi pelaksana program bukanlah hal yang gampang/ menuntut tanggungjawab yang besar menyebabkan mereka merasa terbebani oleh tugasnya.

Tabel IV.52  
TINGKAT TANGGAPAN PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Positif	7	8,5
Cukup positif	23	28
Kurang positif	46	56,1
Tidak positif	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.38

Dari tabel IV.52 diketahui tingkat tanggapan pelaksana program terhadap program PEMP dari 82 responden sebagian besar 56,1% responden menjawab kurang positif.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah para pelaksana program PEMP tidak menginginkan menjadi pelaksana program tetapi hanya sekedar menjadi penerima program.

Tabel IV.53  
TINGKAT KEPERCAYAAN PROGRAM PEMP  
MEMBAWA PERUBAHAN YANG POSITIF

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Percaya	4	4,9
Cukup percaya	28	34,1
Kurang percaya	44	53,7
Tidak percaya	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.39

Dari tabel IV. 53 diketahui dilihat dari tingkat kepercayaan pelaksana program bahwa program akan membawa perubahan yang positif bagi penerima

program dari 82 responden sebagian besar 53,7 % responden menjawab kurang percaya.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut bahwa para pelaksana program beranggapan adanya kredit program PEMP yang tidak besar hanya akan membawa perubahan yang sedikit bagi peningkatan pendapatan penerima program.

Tabel.IV. 54  
TINGKAT TIDAK BERTENTANGAN PROGRAM DENGAN KEYAKINAN-  
KEYAKINAN PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak bertentangan	6	7,3
Kurang bertentangan	33	26,8
Cukup bertentangan	48	58,5
Bertentangan	6	7,3
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.40

Dari tabel IV. 54 diketahui dilihat dari tingkat tidak bertentangnya program dengan keyakinan-keyakinan pelaksana program dari 82 responden sebagian besar 58,5 % responden menjawab cukup bertentangan.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah mereka percaya pada keyakinanya menjadi pelaksana program merupakan tugas yang membuang waktu dan tenaga karena mereka melakukan sesuatu jika tidak bisa menghasilkan sesuatu bagi keluarganya adalah tindakan kurang berguna.

Tabel IV. 55  
TINGKAT TIDAK BERTENTANGAN  
DENGAN NORMA-NORMA YANG DIANUT

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak bertentangan	4	4,9
Kurang bertentangan	25	30,5
Cukup bertentangan	45	54,9
Bertentangan	8	9,8
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.41

Dari tabel IV.55 diketahui dilihat dari tingkat ketidakbertentangan menjadi pelaksana program PEMP dengan norma-norma yang dianutnya dari 82 responden sebagian besar 54,9 % responden menjawab cukup bertentangan.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya tersebut adalah dikeluarganya para pelaksana program PEMP nilai yang dipegang bagaimana kepala keluarga bisa bekerja maksimal untuk dapat menghidupi keluarganya sehingga menjadi pelaksana program PEMP merupakan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma keluarganya.

Tabel IV.56  
TINGKAT INTENSITAS MENARIK ANGSURAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Intensif	7	8,5
Cukup intensif	24	29,3
Kurang intensif	44	53,7
Tidak intensif	7	8,5
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.42

Dari tabel IV. 56 diketahui dilihat dari tingkat intensifnya pelaksana program dalam menarik angsuran dari 82 responden sebagian besar 53,7 % responden menjawab kurang intensif.

Alasan sebagian besar responden atas jawabannya para pelaksana program mengutamakan kebutuhan keluarganya dahulu sehingga menarik angsuran dilakukan bila punya waktu senggang untuk menarik angsuran.

Tabel IV.57  
TINGKAT MELAKSANAKAN TUGAS  
SESUAI DENGAN ATURAN

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sesuai	5	6,1
Cukup sesuai	25	30,5
Kurang sesuai	43	53,4
Tidak sesuai	9	11
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.43

Dari tabel IV.57 diketahui dilihat dari tingkat pelaksana program melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan program PEMP dari 82 responden sebagian besar 53,4 % responden menjawab kurang sesuai.

Alasan sebagian besar responden atas jawabannya adalah pelaksana program menarik angsuran tidak sesuai waktu yang ditentukan, jarang memberikan informasi tentang program PEMP dan jarang melakukan koordinasi dengan kelompoknya.

Tabel IV.58  
TINGKAT MENJALIN KERJASAMA  
DENGAN PENERIMA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Bekerjasama	6	7,3
Cukup bekerjasama	26	31,7
Kurang bekerja sama	45	54,9
Tidak bekerja sama	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.44

Dari tabel IV.58 diketahui dilihat dari tingkat pelaksana program menjalin kerjasama yang baik dengan penerima program dari 82 responden sebagian besar responden 54,9 % responden menjawab kurang bekerjasama.

Alasan sebagian besar responden atas jawabanya adalah pelaksana program kurang bisa saling bekerjasama dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban mengangsur kredit.

Tabel IV.59  
TINGKAT PELAKSANA MENERIMA PROGRAM  
DENGAN SEPENUH HATINYA

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Menerima	4	4,9
Cukup menerima	29	35,4
Kurang menerima	44	53,7
Tidak menerima	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.45

Dari tabel IV.59 diketahui dilihat dari tingkat pelaksana program menerima program dengan sepenuh hatinya dari 82 responden sebagian besar 53,7 % responden kurang menerima program.

Alasan sebagian responden atas jawabanya adalah pelaksana program kurang ikhlas menjadi pelaksana program PEMP karena beban dan tanggungjawabnya besar.

Tabel IV.60  
TINGKAT KENETRALAN PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Netral	5	6,1
Cukup netral	26	37,1
Kurang netral	46	56,1
Tidak netral	5	6,1
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.46

Dari tabel IV.60 diketahui dilihat dari tingkat kenetralan pelaksana program dengan tidak membedakan sesama penerima program bahwa 56,1% responden menjawab kurang netral.

Alasan sebagian responden atas jawabanya adalah pelaksana program cenderung mengutamakan kepentingan penerima program yang mempunyai hubungan kerabat dan sahabatnya sehingga dalam tugasnya terlihat cenderung pilih kasih.

Tabel IV.61  
TINGKAT MEMPENGARUHI PARA PENERIMA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Tidak mempengaruhi	6	7,3
Kurang mempengaruhi	26	31,7
Cukup mempengaruhi	41	50
Tidak mempengaruhi	9	11
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no.47

Dari tabel IV.61 diketahui dilihat dari tingkat pelaksana program mempengaruhi para penerima program untuk menentang program PEMP dari 82 responden sebagian besar 50 % responden menjawab cukup mempengaruhi.

Alasan sebagian responden atas jawabanya adalah para pelaksana program cenderung melakukan tindakan pemberitahuan bahwa program pada prinsipnya hibah sehingga tidak mengembalikan hutang dalam angsuran tidak masalah bilamana penerima program merasa tidak sanggup untuk mengangsur.

Berdasarkan data yang disajikan tersebut kemudian disajikan pengelompokan kategori rumusnya sebagai berikut :

$$i = R/k$$

Keterangan :

$i$  = Interval kelas

$R$  = Range (jarak), merupakan hasil skor tertinggi dikurangi skor terendah

$k$  = Jumlah kelas

Dari rumus diatas maka didapat  $i = 29-18 = 11/4 = 2,75$  maka  $i = 3$ .

Pengelompokan skor tabel untuk variabel sikap aparat adalah sebagai berikut :

Tabel IV.62  
KLASIFIKASI SKOR VARIABEL  
SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Notasi	Kelas Interval
Rendah	R	18-20
Kurang Tinggi	KT	21-23
Cukup Tinggi	CT	24-26
Tinggi	T	27-29

Berdasarkan klasifikasi skor variabel di atas maka kemudian dilakukan rekapitulasi penilaian variabel sikap kerja pelaksana program. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel IV.63  
REKAPITULASI PENILAIAN VARIABEL  
SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM

Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
Rendah (R)	7	8,54
KurangTinggi (KT)	38	46,34
Cukup Tinggi( CT)	26	31,71
Tinggi (T)	11	13,41
Jumlah	82	100

Sumber : Diolah dari pertanyaan no 37-47

Dari tabel IV.63 tentang rekapitulasi di atas dapat dilihat bahwa sikap kerja pelaksana program yang dimiliki pelaksana program dalam melaksanakan program PEMP kurang baik bagi terciptanya tujuan program, hal ini ditunjukkan oleh rekapitulasi penilaian variabel sikap kerja pelaksana program sebagian besar 46,34 % kurang tinggi.

### C. Analisis Data

Pada bab ini akan disajikan beberapa tabulasi silang yang akan menunjukkan hubungan diantara variabel-variabel penelitian. Analisis dalam bentuk tabulasi silang ini dimaksudkan untuk seberapa besar persentase hubungan antara masing masing variabel X dengan variabel Y.

Setelah itu penulis juga akan mengajukan analisis secara kualitatif yang bertujuan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif. Hasil dari analisis kualitatif ini didapat dari hasil alasan dari setiap pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel "X" yaitu tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ), dan sikap kerja pelaksana program ( $X_3$ ) serta vsatu variabel "Y" implementasi Program Pemberdayaa Ekonomi Masyaakat Pesisir (Y) di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang, Utara Kota Semarang.

#### C. 1. Analisis Kuantitatif

C. 1. 1. Hubungan antara tingkat komunikasi ( $X_1$ ) dengan implementasi program PEMP (Y) di Kelurahan Tanjung Mas, Keamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

Hubungan antara tingkat komunikasi ( $X_1$ ) dengan implementasi program PEMP (Y) dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV.64, sebagai berikut:

Tabel IV.64  
 TABULASI SILANG ANTARA TINGKAT KOMUNIKASI (X1)  
 DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)

Implementasi program	Tingkat komunikasi				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	1			2
	(16,67%)	(4,76%)			(2,4%)
CT	5	13	6		24
	(83,33%)	(61,90%)	(16,22%)		(29,27%)
KT		7	22	11	40
		(33,33%)	(59,46%)	(61,11%)	(48,78%)
R			9	7	16
			(24,32%)	(38,88%)	(19,51%)
Jumlah	6	21	37	18	82
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV.64 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa tingkat komunikasi tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 83,33 % mengatakan tingkat komunikasi tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi cukup tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 61,90 % mengatakan tingkat komunikasi cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 59,46 % mengatakan tingkat komunikasi kurang tinggi dengan implementasi

program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan tingkat komunikasi rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 61, 11 % mengatakan tingkat komunikasi rendah dengan implementasi program kurang tinggi.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara tingkat komunikasi (X1) dengan implementasi program (Y).

C. 1. 2. Hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program PEMP (Y)

Hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program dengan implementasi program PEMP dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV.65 sebagai berikut :

Tabel IV.65  
TABULASI SILANG ANTARA KEMAMPUAN KERJA  
PELAKSANA PROGRAM (X<sub>2</sub>) DENGAN IMPLEMENTASI  
PROGRAM (Y)

Implementasi program	Kemampuan kerja pelaksana program				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	1	1			2
	(20%)	(3,7%)			(2,4%)
CT	3	14	7		24
	(60%)	(51,58%)	(15,91%)		(29,27%)
KT	1	12	27		40
	(20%)	(44,44%)	(61,36%)		(48,78%)
R			10	6	16
			(22,73%)	(100%)	(19,51%)
Jumlah	5	27	44	6	82
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan:

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV.65 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa kemampuan kerja pelaksana program tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 60 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program cukup tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 51, 58 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 61, 36 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program kurang tinggi dengan implementasi program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan kemampuan kerja pelaksana program rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 100 % mengatakan kemampuan kerja pelaksana program rendah dengan implementasi program rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program (Y).

C. 1. 3. Hubungan antara sikap kerja pelaksana program ( $X_2$ ) dengan variabel implementasi program PEMP (Y)

Hubungan antara sikap kerja pelaksana program dengan implementasi program PEMP dapat dilihat dengan deskripsi tabel IV.66 sebagai berikut :

Tabel IV.66  
TABULASI SILANG ANTARA SIKAP KERJA PELAKSANA PROGRAM (X3) DENGAN IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)

Implementasi program	Sikap kerja pelaksana program				Jumlah
	T	CT	KT	R	
T	2				2
	(18,18%)				(2,4%)
CT	8	13	3		24
	(72,72%)	(50%)	(7,89%)		(29,27%)
KT	1	12	26	1	40
	(9,09%)	(46,15%)	(68,42%)	(14,26%)	(48,78%)
R		1	9	6	16
		(3,85%)	(23,68%)	(85,71%)	(19,51%)
Jumlah	11	26	38	7	82
	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Keterangan

T = Tinggi

CT = Cukup Tinggi

KT = Kurang tinggi

R = Rendah

Dari tabel IV.66 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari 100 % mereka yang mengatakan bahwa sikap kerja pelaksana program tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 72, 72 % mengatakan sikap kerja pelaksana program tinggi dengan implementasi program cukup tinggi. Kemudian dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program cukup tinggi dalam implementasi program PEMP

sebesar 50 % mengatakan sikap kerja pelaksana program cukup tinggi dengan implementasi program cukup tinggi pula.

Sementara itu, dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program kurang tinggi dalam implementasi program PEMP sebesar 68, 42 % mengatakan sikap kerja pelaksana program kurang tinggi dengan implementasi program kurang tinggi pula. Seterusnya, dari 100 % mereka yang mengatakan sikap kerja pelaksana program rendah dalam implementasi program PEMP sebesar 85, 71 % mengatakan sikap kerja pelaksana program rendah dengan implementasi program rendah pula.

Besarnya persentase-persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan hubungan antara sikap kerja pelaksana program (X3) dengan implementasi program (Y).

## C. 2. Analisis Kualitatif

Berikut ini analisis kualitatif yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal kondisi ini dilihat dari tingkat pemahaman penerima mprogram masih kurang. Dilihat dari proses implementasi program PEMP belum melibatkan calon penerima, jasa pelayanan kredit belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pengelola program/ pelaksana program ditingkat manajemen program. Dilihat dari sisi manfaat, program yang didapat hanya sekedar menambah modal usaha

masyarakat nelayan dan dampaknya relatif kurang bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP kondisi ini bisa dilihat dari kurangnya pemahaman penerima program terhadap program PEMP, yang disebabkan oleh kurang jelasnya, rincinya dan memadainya serta media yang digunakan kurang efektif dalam memperjelas pesan-pesan kebijakan. Frekuensi penyampaian komunikasi program dari pengelola program ke pelaksana kurang, kemudian para pelaksana program pun pemahamannya terhadap program kurang karena rata-rata pendidikannya masih relatif masih rendah dan mereka jarang melakukan transfer komunikasi kepada penerima program. Kondisi yang terjadi di atas menyebabkan implementasi kebijakan kurang bisa berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik.

Kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP kondisi ini terjadi karena sebagian besar para pelaksana program di lapangan yang merupakan koordinator kelompok sebagian besar sehingga mereka kurang memiliki kemampuan memadai menyangkut kemampuan teknis, kemampuan berinteraksi, kemampuan konseptual dan kemampuan berinteraksi rendah. Kondisi yang terjadi tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap proses implementasi yang terjadi dilapangan.

Sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP dilapangan, kondisi ini ditunjukkan oleh kurang baiknya komponen kognisinya seperti dalam menjalankan tugasnya meras

kurang sesuai dengan keinginan pribadinya, kurang mempunyai penilaian yang positif terhadap program dan kurang yakin program akan membawa perubahan positif bagi masyarakatnya. Kemudian Secara afektif para pelaksana program PEMP merasa program bertentangan dengan keyakinan pribadinya dan norma yang dianutnya. Komponen konatif dari pelaksana programpun masih kurang terlihat dari kurang intensifnya dalam menarik angsuran, kurang melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk program dan kurang berinisiatif dalam memabangun kerjasama dengan penerima program. Sementara itu, berkaitan dengan tanggapannya terhadap program PEMP para pelaksana program kurang bisa menerima program dengan sepenuh hatinya, terkesan kurang netral dalam menjalankan tugasnya dan menganggap program hibah sehingga ada kesan aresisten terhadap program PEMP Kondisi inilah yang menjadikan proses implementasi program kurang berjalan secara maksimal dan berhasil secara maksimal pula.

#### **D. Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui hubungan antara masing masing variabel independen dengan variabel dependen dan juga pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen baik secara tunggal maupun bersama-sama. Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan teknik Koefisien Korelasi Rank Kendall, Koefisien Konkordansi Kendall dan Koefisien Determinan (KD).

D. 1. Analisis korelasi rank kendall antara tingkat komunikasi (X<sub>1</sub>) dengan implementasi program (Y)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara komunikasi (X<sub>1</sub>) dengan implementasi program (Y) sebesar  $\tau_{X_1Y} = 0,628$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,01$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat komunikasi (X<sub>1</sub>) dengan implementasi program (X<sub>2</sub>)”.

Secara manual koefisien korelasi Kendall ( $\tau_{X_1Y}$ ) sebesar 0,628 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test dengan cara sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,628}{\sqrt{\frac{2(2.82+5)}{9.82(82-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,628}{\sqrt{\frac{2(164+5)}{738.81}}}$$

$$Z = \frac{0,628}{\sqrt{\frac{338}{59778}}}$$

$$Z = \frac{0,628}{\sqrt{0,005654}}$$

$$Z = \frac{0,628}{0,0752}$$

$$Z = 8,35$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 8,35. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt 1 %) sebesar 2,64 dan Z-tabel pada 5 % (Zt 5 %) sebesar 1,99. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (8,35) > Zt 5 % (1,99) dan Zt 1 % (2,64). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara tingkat komunikasi (X1) dengan implementasi program (Y)” **diterima.**

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel  $X_1$  terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD), rumusnya sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,628^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,3943 \cdot 100 \%$$

$$KD = 39,43 \%$$

Hal ini menunjukkan sebesar 39,43 persen variasi yang terjadi pada implementasi program (Y) disebabkan oleh pengaruh tingkat komunikasi (X1).

D. 2. Analisis korelasi rank kendall antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program (Y)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan dengan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program (Y) sebesar  $\tau_{X_2Y} = 0,601$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,01$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program (Y)”.

Secara manual koefisien korelasi Kendall ( $\tau_{X_1Y}$ ) sebesar 0,601 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,601}{\sqrt{\frac{2(2.82+5)}{9.82(82-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,601}{\sqrt{\frac{2(164+5)}{738.81}}}$$

$$Z = \frac{0,601}{\sqrt{\frac{338}{59778}}}$$

$$Z = \frac{0,601}{\sqrt{0,005654}}$$

$$Z = \frac{0,601}{0,0752}$$

$$Z = 7,99$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z hitung sebesar 7,99. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt 1%) sebesar 2,64 dan Z-tabel pada 5 % (Zt 5 %) sebesar 1,99. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (7, 99) > Zt 5 % (1,99) dan Zt 1 % (2, 64). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara kemampuan kerja pelaksana program (X2) dengan implementasi program (Y)” diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel X<sub>2</sub> terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD), rumusnya sebagai berikut :

$$KD = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,601^2 \cdot 100 \%$$

$$KD = 0,3612 \cdot 100 \%$$

$$KD = 36,12 \%$$

Hal ini menunjukkan sebesar 36,12 % variasi yang terjadi pada implementasi program (Y) disebabkan oleh pengaruh kemampuan kerja pelaksana program (X2).

D. 3. Analisis korelasi rank kendall antara sikap kerja pelaksana program (X<sub>3</sub>) dengan implementasi program (Y)

Dalam analisis ini menggunakan perhitungan dengan bantuan komputer (SPSS). Tabel dalam lampiran memperlihatkan koefisien korelasi antara kemampuan kerja pelaksana program (X<sub>2</sub>) dengan implementasi program (Y) sebesar  $\tau_{X_3Y} = 0,650$  dengan probabilitas kesalahan (sig) sebesar 0,000. Oleh karena sig sebesar  $0,000 < 0,01$ , maka inferensi yang diambil adalah menerima hipotesis yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap kerja pelaksana program (X<sub>3</sub>) dengan implementasi program (Y)”.

Secara manual koefisien korelasi kendall ( $\tau_{X_3Y}$ ) sebesar 0,650 tersebut masih perlu ditransformasikan ke dalam Z-test, dengan rumus sebagai berikut :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,650}{\sqrt{\frac{2(2.82+5)}{9.82(82-1)}}}$$

$$Z = \frac{0,650}{\sqrt{\frac{2(164+5)}{738.81}}}$$

$$Z = \frac{0,650}{\sqrt{\frac{338}{59778}}}$$

$$Z = \frac{0,650}{\sqrt{0,005654}}$$

$$Z = \frac{0,650}{0,0752}$$

$$Z = 8,64$$

Berdasarkan perhitungan ditemukan harga Z-hitung sebesar 8,64. sedangkan harga Z-tabel (lihat tabel Z kritik) pada taraf signifikansi 1% (Zt 1 %) sebesar 2,64 dan Z-tabel pada 5% (Zt 5%) sebesar 1,99. Hasil konsultasi menunjukkan harga Z-hitung (8,64) > Zt 5% (1,99) dan Zt 1% (2,64). Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “terdapat hubungan positif dan signifikan antara sikap kerja pelaksana program (X3) dengan implementasi program (Y)” **diterima.**

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel  $X_3$  terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinasi (KD) sebagai berikut

:

$$KD (X_3Y) = W^2 \cdot 100 \%$$

$$KD (X_3Y) = 0,650^2 \cdot 100 \%$$

$$KD (X_3Y) = 0,4225 \cdot 100 \%$$

$$KD (X_3Y) = 42,25 \%$$

Hal ini berarti menunjukkan sebesar 42, 25 % variasi yang terjadi pada implementasi program (Y) disebabkan oleh pengaruh sikap kerja pelaksana program (X3).

D. 4. Analisis konkordasi kendall antara tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ), dan sikap kerja pelaksana program ( $X_3$ ) dengan implementasi program (Y)

Analisis ini digunakan untuk menguji signifikansi antara 3 variabel independen yaitu tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program, sikap kerja pelaksana program yang diajukan oleh penulis dengan variabel dependennya yaitu implementasi program. Hasil Koefisien Konkordasi diketahui dengan bantuan komputer (SPSS) pada lampiran menghasilkan  $W = 0,783$ .

Untuk menguji signifikansi Koefisien Konkordasi Kendall (W) maka harga W tersebut dimasukkan ke rumus Chi Kuadrat sehingga diperoleh hasil harga chi kuadrat sebesar 192,626 dengan probabilitas kesalahan (signifikansi) sebesar 0,000. Dengan  $df = K - 1 = 3$  menunjukkan probabilitas sebesar 0,00 dan nilai ini lebih kecil dari  $\alpha = 0,01$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dengan kata lain menerima hipotesis yang berbunyi "terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ), dan sikap kerja pelaksana program (Y) dengan implementasi program (Y).

Angka yang diperoleh di atas selanjutnya dikonsultasikan dengan harga kritis Chi Kuadrat dengan derajat bebas ( $df$ ) =  $N - 1 = 82$  pada taraf signifikansi 1% dan 5%. Harga kritis tabel antara  $N = 80$  sampai dengan 90 pada taraf signifikansi menunjukkan angka 118,22, sedangkan pada taraf signifikansi 5% menunjukkan angka 107,52. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut diketahui

bahwa  $X^2$  hasil penghitungan  $> X^2$  pada taraf signifikansi 1 % dan 5 %, yaitu

$$1192,626 > 118,22 \text{ (sig 1\%)}$$

$$192,626 > 107,52 \text{ (sig 5\%)}$$

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis membuktikan bahwa antara tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ), dan sikap kerja pelaksana program ( $X_2$ ) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan implementasi program (Y). Dengan demikian hipotesis mayor yang diajukan oleh penulis **diterima**.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh antara  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  secara bersama-sama terhadap Y dapat dihitung dengan Koefisien Determinan (KD), rumusnya sebagai berikut :

$$\text{KD (X1,X2 dan X3. Y)} = W^2 \cdot 100 \%$$

$$\text{KD (X1,X2 dan X3. Y)} = 0,783^2 \cdot 100 \%$$

$$\text{KD (X1,X2 dan X3. Y)} = 0,6131 \cdot 100 \%$$

$$\text{KD (X1,X2 dan X3. Y)} = 61,31 \%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa dalam implementasi program (Y) terjadi pengaruh sebesar 62,41 yang disebabkan oleh tingkat komunikasi ( $X_1$ ), kemampuan kerja pelaksana program ( $X_2$ ), dan sikap kerja pelaksana program ( $X_3$ ).

Sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat diperoleh pula harga Non KD, yaitu sebesar  $100 \% - 61,31 \% = 38,69\%$ . Hal ini menunjukkan sebesar 38,69 % variasi yang terjadi pada implementasi program PEMP

disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program (X3).

#### **D. Diskusi**

Berikut ini beberapa poin-poin penting hasil penelitian sebagai bahan diskusi terhadap hasil penelitian yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasil rekapitulasi variabel implementasi kebijakan masih kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dari nilai skor dalam kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi sebanyak 40 (48,78 %). Kondisi ini didukung oleh nilai ukur dari masing-masing indikator variabel implementasi program (Y) yaitu kurang sesuai rencana-rencana program dalam implementasinya, kurang lancarnya implementasi program PEMP di lapangan, kurang mudahnya penerima program dalam memenuhi proses persyaratan kredit, kurang dilibatkannya penerima program dalam implementasi program, kurang bermanfaatnya program bagi penerima program, kurang baiknya kemampuan badan pelaksana program dalam menyelenggarakan jasa-jasa pelayanan kredit, para penerima program kurang memenuhi ketentuan dalam mengangsur kredit, program kurang mengurangi kesulitan modal penerima program, program kurang meningkatkan pendapatan penerima program, program kurang mengurangi kesulitan ekonomi penerima program, dan program kurang bisa menimbulkan kesadaran penerima program tentang arti pentingnya program pembangunan.

2. Hasil rekapitulasi variabel tingkat komunikasi masih kurang mendukung, hal ini ditunjukkan dari nilai skor dalam kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi sebanyak 37 (45, 12 %). Nilai ukur dari indikator-indikator tingkat komunikasi (X1) yang menunjukkan tingkat komunikasi masih kurang mendukung dalam implementasi program PEMP adalah pelaksana program kurang menguasai informasi tentang program PEMP, pelaksana program kurang paham terhadap implementasi program PEMP, penerima program kurang jelas menerima informasi program PEMP, bahasa yang digunakan kurang jelas dan kurang mudah dipahami oleh penerima program PEMP, informasi program PEMP kurang rinci diterima penerima program PEMP, informasi yang disampaikan kurang memadai, media komunikasi yang digunakan kurang memperjelas pesan yang diterima, informasi program PEMP kurang sesuai diterima, media komunikasi yang digunakan kurang tepat dan frekuensi penyampaian informasi program PEMP kurang rutin.
3. Hasil rekapitulasi variabel kemampuan kerja pelaksana program kurang baik, hal ini ditunjukkan dari nilai skor dalam kategori jawaban sebagian besar kurang tinggi sebanyak 44 (53, 66%) responden. Nilai ukur dari indikator-indikator kemampuan kerja pelaksana program yang menunjukkan kondisi kurang baiknya kemampuan kerja pelaksana program adalah kemampuan dalam melaksanakan persyaratan kredit kurang baik, kemampuan dalam menerima informasi kurang baik, kemampuan menjalin hubungan silaturahmi kurang baik, kemampuan menjalin kerjasama kurang baik, kemampuan dalam memantu menyelesaikan konflik kurang baik, kemampuan

dalam menciptakan kesadaran kurang baik, kemampuan dalam memahami keluhan kurang baik, kemampuan dalam menyampaikan ide-ide pembaharuan kurang baik, kemampuan dalam merumuskan solusi permasalahan kurang baik, kemampuan dalam mengikuti prosedur-prosedur implementasi kurang baik, dan kemampuan dalam mengarsipkan kertas kerja kurang baik.

4. Hasil rekapitulasi variabel sikap kerja pelaksana program masih kurang baik, hal ini ditunjukkan dari rekapitulasi penilaian variabel sebagian besar kurang tinggi sebanyak 38 (46, 34 %) responden. Kondisi ini didukung oleh nilai ukur dari masing-masing indikator variabel tersebut yaitu melaksanakan tugasnya kurang sesuai dengan keinginan pribadinya, tanggapan yang kurang positif terhadap program PEMP, kurang percaya program akan membawa perubahan yang positif, cukup bertentangnya dengan keyakinan yang dianutnya, kurang intensifnya dalam menarik angsuran, melaksanakan tugas kurang sesuai dengan aturan program PEMP, kurang bekerjasama dalam menjalin kerjasama, kurang menerima program dengan sepenuh hatinya, kurang netral dalam menjalankan tugasnya dan cukup mempengaruhi penerima program dalam menentang program PEMP.
5. Beberapa hipotesis yang diajukan diterima, berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian yang dapat dilihat pada tabel IV. 64 dibawah ini:

Tabel IV. 67  
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

No	Korelasi variabel	Hasil pengujian	Status	Koefisien Determinan (KD)	Besarnya KD	Urutan
1	X1- Y	Z-test 8, 35 > Z-tabel 2, 64 ( sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X1-Y	39, 43 %	2
2	X2-Y	Z-test 7, 99 > Z-tabel 2, 64 ( sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X2-Y	36, 12 %	3
3	X3-Y	Z-test 8, 64 > Z-tabel 2, 64 ( sig1%) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X3-Y	42, 25 %	1
4	X1, X2 dan X3- Y	X <sup>2</sup> 192, 626 > 118, 22 (sig 1%) dan 107, 52 (sig 5 %)	Diterima	X1, X2 dan X3- Y	61, 31 %	

Dari tabel IV. 64, dapat dijelaskan bahwa:

Variabel indenpenden (X) yang dianggap mempunyai korelasi yang positif dan signifikan paling kuat dan mempunyai pengaruh paling besar terhadap dependen variabel (Y) adalah sikap kerja pelaksana program (X2) dengan besarnya korelasi 8, 64 dan besarnya pengaruh sebesar 42, 25 %.

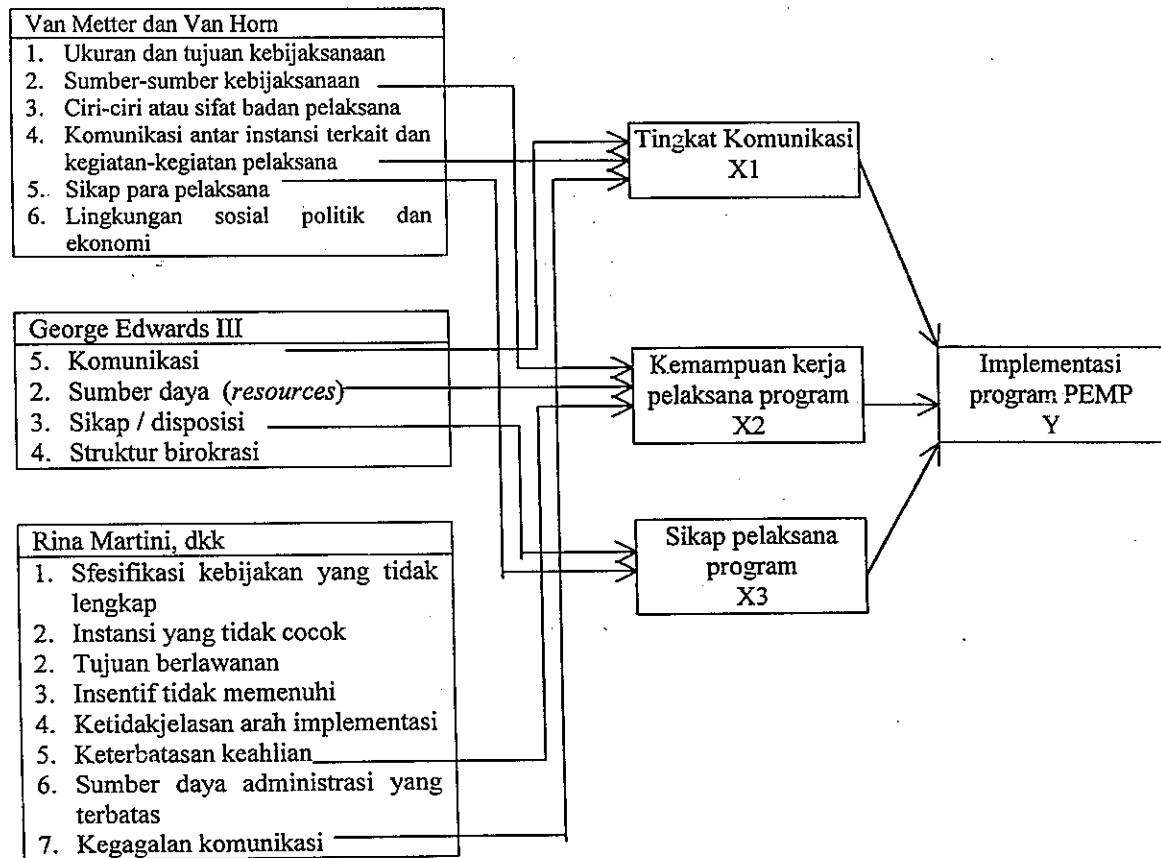
Kemudian hasil pengujian hipotesis mayor menunjukkan bahwa harga X kuadrat 192, 626 > X tabel 118, 22 (sig 1 %) dan 107, 52 (sig 5 %) dengan besarnya pengaruh 61, 31 %. Sebagai kelengkapan studi penelitian, maka dapat diperoleh pula harga Non KD, yaitu sebesar 100% - 61,31% = 38, 69%. Hal ini menunjukkan sebesar 38,69 % variasi yang terjadi pada implementasi program PEMP disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain di luar variabel

tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program(X3).

Penjelasan selanjutnya adalah bahwa hasil penelitian tersebut jika dikaitkan dengan teori-teori yang diambil dalam penelitian adalah relevan, dimana gambaran dari relevanya hasil penelitian dengan landasan teori yang diambil adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian ini peneliti mengambil landasan teori yang mendasari penelitian yang difokuskan dalam studi implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas dengan menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, George Edwards III dan Rina Martini, dkk dengan bangun teori penelitian sebagai berikut:

Bagan IV. 1  
 TEORI PENELITIAN  
 PENGARUH TINGKAT KOMUNIKASI (X1), KEMAMPUAN KERJA  
 PELAKSANA PROGRAM (X2), DAN SIKAP KERJA PELAKSANA  
 PROGRAM (X3) TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM (Y)



Dengan mengacu pada bangun teori tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa variabel-variabel yang diajukan dalam penelitian tersebut secara teoritis dibahas oleh para ahli kebijakan publik dan selanjutnya berdasarkan teori-teori implementasi kebijakan publik tersebut peneliti melakukan sintesa teori dengan mengambil variabel-variabel penelitian untuk dependen variabel (Y) implementasi program, sedangkan untuk independen variabel (X) yaitu X1 tingkat komunikasi, X2 kemampuan kerja pelaksana program dan X3 sikap kerja aparat pelaksana program.

Pengambilan variabel-variabel tersebut didasarkan pada gambaran obyektif yang dikemukakan dilatar belakang masalah bahwa kurang berhasilnya implementasi program PEMP diduga disebabkan oleh faktor tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap kerja pelaksana program.

Kondisi yang terjadi adalah bahwa hasil penelitian menunjukkan hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima, dimana variabel independen (X) yang paling kuat mempunyai hubungan dan pengaruh dalam variabel dependen (Y) implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas adalah sikap kerja pelaksana program (urut 1) dan lainya mengikuti tingkat komunikasi (urut 2), dan kemampuan kerja pelaksana program (urut 3).

Kemudian secara bersama-sama juga terlihat bahwa variabel indenpenden (Y) mempunyai hubungan kuat X-kuadrat sebesar 192, 626 dan pengaruh yang besar, dimana  $KD = 61, 31 \%$  dalam variabel dependen (Y) yaitu implementasi program.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan implikasi yang muncul bilamana ketiga variabel tersebut tidak diperbaiki kemungkinan besar akan mengakibatkan kondisi implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas akan semakin kurang berhasil. Oleh karena itu maka perbaikan terhadap ketiga variabel tersebut, sesegera mungkin untuk diperbaiki dalam usaha menimbulkan implementasi program yang lebih berhasil.

Namun demikian dengan mengacu pada hubungan dan pengaruh tiap variabel independen dalam variabel dependen (Y) maka dimungkinkan untuk perbaikan implementasi program untuk diprioritaskan pada variabel tertentu berdasarkan nilai urutnya. *Pertama*, perbaikan pada sikap kerja pelaksana program. *Kedua*, perbaikan pada tingkat komunikasi. Dan *ketiga*, perbaikan pada kemampuan kerja pelaksana program.

6. Analisis kualitatif dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal, tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP, kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP, dan sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP dilapangan. Kondisi- kondisi ini menunjukkan analisis kualitatif hasil penelitian mendukung analisis kuantitatifnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Variabel implementasi program (Y) masih kurang berhasil, hal ini ditunjukkan dari rekapitulasi penilaian variabel implementasi program sebagian besar kurang tinggi sebanyak 40 (48, 78 %).
2. Variabel tingkat komunikasi (X1) masih kurang mendukung, hal ini ditunjukkan dari hasil rekapitulasi penilaian variabel tingkat komunikasi sebagian besar kurang tinggi sebanyak 37 (45, 12 %).
3. Variabel kemampuan kerja pelaksana program (X2) kurang baik, hal ini ditunjukkan dari hasil rekapitulasi penilaian variabel kemampuan kerja pelaksana program sebagian besar kurang tinggi sebanyak 44 (53, 66 %).
4. Variabel sikap pelaksana program (X3) masih kurang baik, hal ini ditunjukkan dari hasil rekapitulasi penilaian variabel sikap pelaksana program sebagian besar kurang tinggi sebanyak 38 (46, 34 %) responden.
5. Hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian diterima. Gambaran mengenai diterimanya hipotesis dalam penelitian ini bisa dilihat pada tabel V. 1 adalah sebagai berikut:

Tabel V. 1  
HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS PENELITIAN

No	Korelasi variabel	Hasil pengujian	Status	Koefisien Determinan (KD)	Besarnya KD	Urutan
1	X1- Y	Z-test 8, 35 > Z-tabel 2, 64 ( sig1 %) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X1-Y	39, 43 %	2
2	X2-Y	Z-test 7, 99 > Z-tabel 2, 64 ( sig1 %) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X2-Y	36, 12 %	3
3	X3-Y	Z-test 8, 64 > Z-tabel 2, 64 ( sig1 %) dan 1, 99 (sig 5 %)	Diterima	X3-Y	42, 25 %	1
4	X1, X2 dan X3-Y	$X^2$ 192, 626 > 118, 22 (sig 1 %) dan 107, 52 (sig 5 %)	Diterima	X1, X2 dan X3-Y	61, 31 %	

6. Harga Non Koefisien Determinan (KD), yaitu sebesar  $100\% - 61,31\% = 38,69\%$ . Hal ini menunjukkan sebesar 38, 69 % variasi yang terjadi pada implementasi program PEMP disebabkan oleh pengaruh variabel bebas lain diluar variabel tingkat komunikasi (X1), kemampuan kerja pelaksana program (X2), dan sikap kerja pelaksana program(X3).
7. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian tersebut diketahui bahwa variabel sikap kerja pelaksana program (X3) menunjukkan hubungan yang paling positif dan signifikan dengan implementasi program (Y) dan pengaruh yang paling besar terhadap implementasi program yang selanjutnya diikuti tingkat komunikasi (X1) dan kemampuan kerja pelaksana program (X2). Oleh karena itu, prioritas variabel

yang menjadi prioritas dalam rangka perbaikan implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas adalah *pertama*, perbaikan pada sikap kerja pelaksana program. *Kedua*, perbaikan pada tingkat komunikasi. Dan *ketiga*, perbaikan pada kemampuan kerja pelaksana program.

8. Berdasarkan hasil analisis kualitatif diketahui implementasi program PEMP belum berhasil secara maksimal, tingkat komunikasi kurang mendukung implementasi program PEMP, kemampuan kerja pelaksana program masih kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP, dan sikap kerja pelaksana program kurang baik dalam mendukung implementasi program PEMP dilapangan. Kondisi- kondisi ini menunjukkan analisis kualitatif hasil penelitian mendukung analisis kuantitatifnya.

## **B. Rekomendasi**

1. Mengingat  $\text{Non KD} = 100\% - 61,31\% = 38,69\%$  maka sebanyak 38,69% bisa mengambil variabel lain diluar dari variabel pengaruh yang diambil dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kepada peneliti lain yang akan melakukan studi implementasi kebijakan untuk mengambil variabel-variabel penelitian diluar variabel tingkat komunikasi, kemampuan kerja pelaksana program dan sikap pelaksana program.
2. Memperbaiki sikap para pelaksana program PEMP dengan melakukan sarasehan atau rembug warga mengenai arti pentingnya sikap kerja dalam mendukung program PEMP. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memberikan *learning by doing* yaitu proses pembelajaran bagi para pelaksana program dengan menghadirkan tokoh masyarakat yang dianggap berhasil dalam

hidupnya dan mempunyai kemampuan dalam menyakinkan pelaksana program mengerti arti pentingnya program pembangunan. Harapan yang dapat dicapai dengan adanya kegiatan tersebut para pelaksana program akan berpandangan positif terhadap program pembangunan sehingga akan berperilaku mendukung implementasi program PEMP.

3. Melakukan komunikasi program yang lebih intensif kepada penerima program dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai maksud dan tujuan diadakannya program, manfaat program, dampak yang dapat dicapai dengan adanya program PEMP, bagaimana implementasi program PEMP dilapangan dengan melakukan:

- Pendekatan secara interpersonal yang dilakukan pengelola program selaku pihak yang memajemen program baik mengatur keuangan, menentukan strategi bagaimana mengimplementasikan kebijakan dilapangan dan bertanggungjawab terhadap program PEMP kepada pelaksana program dilapangan sehingga mereka merasa *diuwongke* dan dianggap menjadi pihak yang mempunyai jasa bagi suksesnya implementasi program PEMP.
- Para pengelola program PEMP secara intensif berinisiatif datang ketiap kelompok penerima program dengan memperbanyak intensitas pertemuan dengan pelaksana program yang merupakan koordinator kelompok dan para penerima program yang merupakan anggota dari kelompok.
- Media komunikasi yang digunakan dalam transfer informasi program PEMP untuk ditingkatkan, media tersebut berupa surat resmi, spanduk, famplet dan, papan informasi tentang materi program dan tata cara

implementasi program. Dengan adanya media komunikasi yang semakin beragam tersebut diharapkan dapat membantu memperjelas pesan komunikasi yang dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lancarnya proses implementasi dan semakin efektifnya implementasi program PEMP di Kelurahan Tanjung Mas.

4. Melaksanakan kegiatan pelatihan manajemen program bagi para pelaksana program. Dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja pelaksana program PEMP yang diarahkan pada meningkatkan kemampuan komunikasi, kemampuan teknis, kemampuan berinteraksi, kemampuan konseptual dan kemampuan administratifnya sehingga mereka mampu menjadi pelaksana program dilapangan yang memberikan kontribusi yang positif bagi implementasi program PEMP itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan pelatihan kemampuan pelaksana program PEMP
  - a. Membuat master plan mengenai pelatihan kemampuan kerja bagi pelaksana program , meliputi:
    1. Menentukan waktu, hari dan tempat pelatihan
    2. Menentukan materi-materi pokok yang diajarkan dalam pelatihan
    3. Menentukan metode-metode yang tepat dan efektif yang digunakan dalam pelatihan bagi pelaksana program PEMP.
    4. Menentukan pihak-pihak yang dianggap kapabel untuk menjadi tenaga pelatihan bagi pelaksana program PEMP
    5. Membuat estimasi anggaran untuk biaya pelatihan
  - b. Implementasi pelatihan manajemen program PEMP

- a. Melakukan sosialisasi pelatihan manajemen program kepada para pelaksana program melalui pertemuan yang dihadiri pengelola manajemen program dan calon peserta pelatihan yaitu para pelaksana proyek
  - b. Pelaksanaan pelatihan berupa pelatihan bagi para pelaksana program PEMP. Dalam pelaksanaan ini dilakukan pengenalan teori-teori tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana program PEMP, melakukan diskusi tentang materi yang diajarkan dengan metode Forum Discussion Group (FGD) dan melakukan simulasi tentang bagaimana melaksanakan implementasi program PEMP di lapangan.
  - c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelatihan pelaksana program PEMP, pelatihan yang telah dilakukan kemudian dievaluasi dengan menggunakan indikator-indikator kinerja yang telah ditentukan apakah hasil pelatihan tersebut secara maksimal telah mampu mendukung implementasi program PEMP di lapangan.
5. Alokasi dana program PEMP untuk tahun-tahun selanjutnya di Kelurahan Tanjung Mas dan wilayah-wilayah lain di Pantai Utara Pulau Jawa bagi masyarakat nelayan untuk ditingkatkan sehingga akan menimbulkan tambahan modal usaha bagi masyarakat nelayan yang cukup signifikan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan masyarakat nelayan. Kemudian dalam rangka untuk memotivasi dan menimbulkan komitmen terhadap tugas kerja para pelaksana program baik pengelola program (manajemen program) maupun para koordinator program untuk

diberi insentif yang layak dan ini tentunya diharapkan penambahan alokasi dana program PEMP dialokasikan untuk insentif tugas kerja mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahab, Solichin, 1997, *Kebijaksanaan: Kebijakan Publik: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Azwar, Saifudin, 1988, *Sikap Manusia, Teori dan Pemikirannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Badjuri, Abdul Kahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas diponegoro, Semarang.
- Bryant, Coraly dan White, G. Louise, 1988, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Denhard, Robert, 1994, *Public Administration, Action and Orientation*, Wordworth Publicing Company, Belmont.
- Dwianto, Agus, 1999, *Evaluasi Program dan Kebijakan Pemerintah*, makalah disampaikan pada pelatihan TMKR, MAP-UGM, Yogyakarta, 1999.
- Dye, R. Thomas, 1978, *Understanding Public Policy*, Prentice Hall. inc, New York.
- Efendi, Sofyan dan Singarimbun, Masri, 1998, *Metodologi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.
- Gibbson, L, James dkk, 1998, *Proses dan Struktur Perilaku Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Islami, M. Irfan, 1992, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Imawan, Riswanda, 1999, *Kebijakan Publik*, Magister Administrasi Publik, Universitas Gajahmada, Yogyakarta.
- Jiwanto, Gunawan, 1985, *Komunikasi dalam Organisasi*, Pusat Pengembangan Manajemen, Andi Ofset, Yogyakarta.
- Moenir, A. S, 1987, *Pendekatan Manusia dalam Organisasi terhadap Penataan Pegawai*, Gunung Agung, Jakarta.
- Nugroho, D. Riant, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex Media Computindo, Gramedia, Jakarta.

- Purnaweni, Hartuti, 1994, *Diklat Kebijakan Publik, suntingan dari dari Implementing Publik Policy oleh George Edwards III*, Universitas Diponegoro Semarang.
- Steers, M. Richard, 1985, *Efektivitas Organisasi*, di Terjemahkan oleh Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sabatier, A. Paul and Mazmanian Daniel, 1986, *Effective Policy Implementation, Health*, Lexington Mass DC.
- Siagian, P. Sondang P, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, (ed ), 1982, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- , 1989, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Soemidjo, Wahyu, 1987, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subana, M. dan S. Sudrajat, 2001, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Sugiono, 1997, *Metode Penelitian Administrasi*, Cetakan V, Alfabet, Bandung.
- Taufik, Ahmad, 1987, *Korelasi dan Analisis Regresi Ganda*, Nur Cahaya, Semarang.
- Thoha, Miftah, 1990, *Aspek-Aspek Pokok Ilmu-Ilmu Administrasi*, Ghalia, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 1996, *Teori Kebijakan Publik*, UGM Press, Yogyakarta.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, MedPress, Yogyakarta.
- Wirawan Sarwono, Sarlito, 1998, *Psikologi Sosial : Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yuwono, S, 1989, *Ikhtisar Komunikasi Administrasi*, Liberty, Jakarta.
- Buku Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (PEMP), 2003, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.